

**PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)

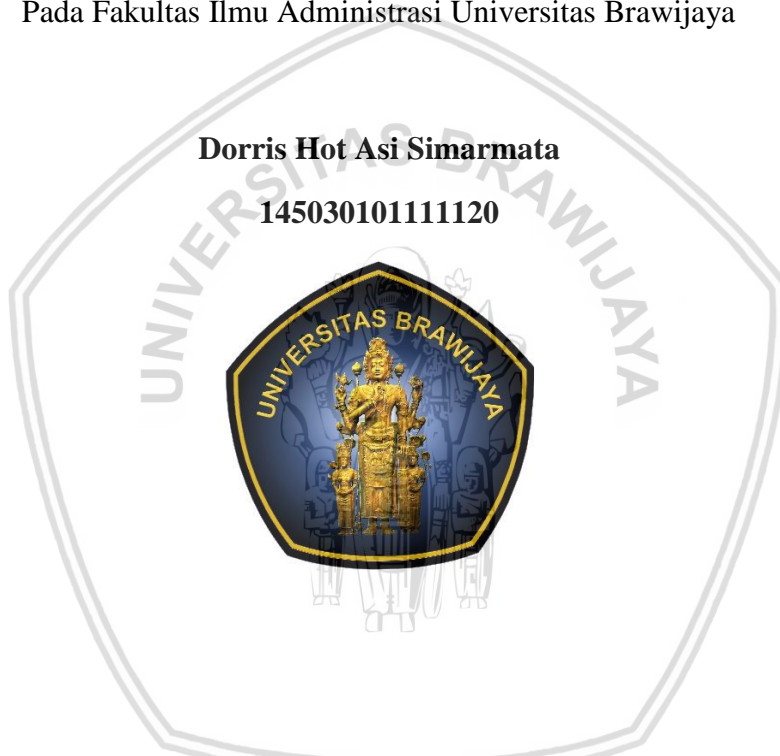
SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Dorris Hot Asi Simarmata

145030101111120



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batu

(Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)

Disusun oleh : Dorris Hot Asi Simarmata

NIM : 145030101111120

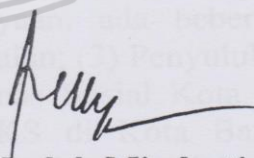
Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 04 Juli 2018

Komisi Pembimbing,


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Kata Kunci : Pemberdayaan, PMKS, Kesejahteraan

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2018

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Dorris Hot Asi Simarmata

Judul : Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batu (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002


Dr. M. Makmur, M.S
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota


Muhammad Resyihan Hendrawan, S.IP, M.Hum
NIP. 20140587 1204 1 000

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 04 Juli 2018

Mahasiswa



Nama : Dorris Hot Asi Simarmata

NIM : 145030101111120

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan berkat dan penyertaan-Nya setiap hari sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat.
2. Buat Bapak M. Simarmata dan Ibu H. Limbong selaku orang tua yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
3. Nelfa Simarmata dan Tiarmauli Simarmata selaku Kakak saya serta seluruh keluarga besar yang terus mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Boy Lumbangaol, Inosensius Nadeak dan Ivan Siahaan selaku teman dan sahabat terbaik saya yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta nasehat kepada penulis.
5. Untuk Johannes Lubis, Juan Mangeto, Aditya Evando, Dendi dan seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2014 yang telah memberikan bantuan pemikiran dan dukungan dalam penyusunan skripsi penulis
6. Untuk teman-teman saya yang ada dikontrakan; Fransisco Nainggolan, Irwantor Fakdawer, Bernad Siagian, Daniel Allegrio dan Raja Situmorang yang selalu setia menemani penulis dari tahun 2016 sampai sekarang.

7. Untuk rekan-rekan kerja saya di JGK Management Malang; Raja Situmorang, Fila Natanael, Joseph Philip, Yoel Sitorus, yang selalu setia menemani penulis dari tahun 2016 sampai sekarang.
8. Terimah kasih untuk keluarga penulis di Malang yakni ; KEMAHSAYA, Mancis FC, N-HKBP Malang, serta PMK IMANUEL yang Telah menemani penulis dari tahun 2014 sampai sekarang.
9. Berterimakasih juga buat semua cafe, tempat makan, tempat nongkrong, dan tempat hiburan di Kota Malang yang ikut berperan memberikan refreshing sehingga penulis dapat dalam menyelesaikan skripsi
10. Buat semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan

Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batu (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu). Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si . 100 halaman + xv

RINGKASAN

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dan berdaya adalah kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan dan kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kemampuan kepada masyarakat untuk mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitarnya. Tujuan akhir untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu cara ditetapkan oleh Dinas Sosial sebagai untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Batu yaitu menuju masyarakat Kota Batu yang Produktif dan Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Batu, sedangkan situsnya berada di Dinas Sosial Kota Batu. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota batu dirumuskan melalui beberapa tahap yaitu: (1) Tahap Perencanaan; (2) Tahap Pengkajian; (3) Tahap Pemilihan Alternatif Program; (4) Tahap Pemfomalisasian rencanaaksi; (5) Tahap Pelaksanaan; (6) Tahap Pengawasan Selain dari proses pemberdayaan, ada beberapa bentuk pemberdayaan yaitu: (1) Pelatihan Kerja; (2) Permodalan; (3) Penyuluhan. Dan ini merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Batu untuk mengurangi dan mencegah menyebarkan PMKS di Kota Batu. Namun, pemberdayaan PMKS di Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan sudah cukup baik, hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kota Batu yang bersedia memenuhi sarana prasarana dalam pemberdayaan walaupun tidak semua permasalahan kategori PMKS dapat diselesaikan karena anggaran yang tidak mencukupi. Selain itu adanya faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat PMKS berdampak pada kurang maksimalnya pemberdayaan PMKS oleh Dinas Sosial Kota Batu.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial

Dorris Hot Asi Simarmata, 2018. **Empowerment of People with Social Welfare Problems in Improving People's Welfare in Batu City (Study at Social Service of Batu City)**. Essay. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya. Supervisor: Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. 100 pages + xv

SUMMARY

Empowerment comes from the word power which means strength or ability. And powerless is a condition or circumstance that supports the existence of strength and ability. Based on the definition of community empowerment can be interpreted as giving the ability to the community to take care of itself in accordance with the ability possessed by utilizing the condition of the surrounding environment. The ultimate goal to solve a particular problem. Community Empowerment People with Social Welfare Problems is one of the ways determined by the Social Service as to achieve the vision and mission of Batu City Social Office that is toward the people of Batu that productive and prosperous.

This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Batu Town, while the site is in Batu City Social Service. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques through interviews and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids.

The results showed that the process of empowering people with social welfare problems in the city of stone was formulated through several stages: (1) Planning Phase; (2) Assessment Stage; (3) Alternative Electing Stages of the Program; (4) Phase Modalisian planan; (5) Implementation Phase; (6) Supervision Phase In addition to the empowerment process, there are several forms of empowerment: (1) Job Training; (2) Capital; (3) Counseling. And this is the steps taken by Batu City Social Office to reduce and prevent the spread of People with Social Welfare Problems in Batu City. However, the empowerment of People with Social Welfare Problems in Batu City in improving the welfare is good enough, this is because Batu City Social Office is willing to fulfill the infrastructure facilities in empowerment although not all problems of People with Social Welfare Problems category can be solved because of insufficient budget. Besides the existence of inhibiting factors such as lack of awareness and participation of People with Social Welfare Problems community impact on less maximal empowerment of People with Social Welfare Problems by Social Service Batu City.

Keyword : Empowerment, People with Social Welfare Problems, Social Welfare

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, anugerah, serta hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing penulis;

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis;
7. Seluruh aparaturnya Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penelitian penulis;

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 04 Mei 2018

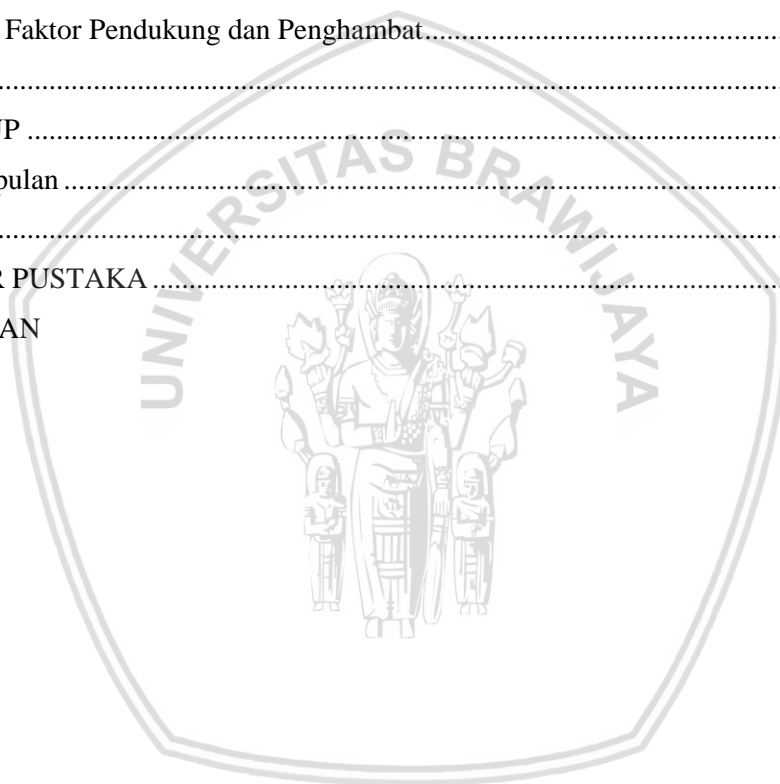
Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematikan Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Administrasi Publik	13
1. Pengertian Administrasi Publik	13
2. Fungsi-Fungsi Administrasi Publik	16
3. Ruang Lingkup Administrasi Publik	17
B. Otonomi Daerah	20
C. Pemerintah Daerah	22
1. Pengertian Pemerintah Daerah	22
2. Peran Pemerintah Daerah	24
D. Kesejahteraan Sosial	25
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial	25
2. Tujuan Kesejahteraan Sosial	27
E. Pemberdayaan Masyarakat	27

1. Pengertian Pemberdayaan	27
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	28
3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat	29
4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	30
5. Tahapan Pemberdayaan	30
6. Upaya Pemberdayaan Masyarakat	32
F. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	33
1. Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	33
2. Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	34
BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian.....	41
1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Batu.....	41
a. Tahapan Pemberdayaan dari Dinas Sosial Batu	41
b. Bentuk-bentuk Pemberdayaan	42
c. Aktor yang terlibat	42
2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batu, meliputi :.....	42
a. Faktor Pendukung	42
b. Faktor Penghambat	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
1. Data Primer	44
2. Data Sekunder	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Instrumen Penelitian	45
G. Metode Analisis Data.....	47
H. Keabsahan Data	48
BAB IV	49
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	49

1. Gambaran Umum Kota Batu.....	49
2. Gambaran Umum Situs Penelitian.....	56
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	63
1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	63
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	82
C. Analisis Data dan Interpretasi.....	92
1. Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Batu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu:.....	92
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	100
BAB V	106
PENUTUP	106
1. Kesimpulan	106
2. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisis Data : Model Interaktif..... 47

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Batu..... 49

Gambar 4.2 Logo Kota Batu 53

Gambar 4.3 Logo Dinas Sosial Kota Batu 57

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Batu 59



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah PMKS di Kota Batu	5
Tabel 4.1 Daftar Pegawai Dinas Sosial Kota Batu	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu konsep yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap negara di seluruh dunia, dimana keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunannya di segala bidang salah satunya adalah pada sektor perekonomian nasional. Pembangunan merupakan suatu langkah perubahan tingkat guna meningkatkan kesejahteraan secara terukur dan alami, baik perubahan dalam segi ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Dengan kata lain pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia pembangunan kesejahteraan merupakan salah satu tujuan nasional dan ini sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dimana Indonesia memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia . Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal itu dapat di lihat di Badan Pusat Statistika, yang hingga pada saat ini Indonesia masih berada dalam posisi 4 besar sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan jumlah populasi 261,1 juta orang pada tahun 2016.(Bank Dunia, 2016)

Tingginya jumlah penduduk ini seiring dengan tigginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik dalam berita jawa pos, tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode september 2017 berada pada angka

26,58 juta (10,12% dari total penduduk di Indonesia). Angka ini tergolong tinggi walaupun sudah terjadi penurunan angka kemiskinan, dimana sebelumnya pada periode maret 2017 angka kemiskinan di indonesia berada pada angka 27,77 juta orang dengan kata lain angka kemiskinan berkurang sekitar 1,19 juta (0,52%). (Jawa Pos, 2017) .

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia ini merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tugas ini sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dan harus diselesaikan secara bertahap sebagai mana tertera dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan Kesejahteraan Sosial. Negara Indonesia wajib melaksanakan pembangunan yang terencana, terpadu, menyeluruh, terarah, bertahap, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tercapainya kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara dan demi tercapainya kesejahteraan sosial maka pada saat ini negara Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional dimana pembangunan difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus melakukan berbagai macam upaya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Dimana dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan sosial, pemerintah pusat

menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah sebagai bentuk dari otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut desentralisasi.

Menurut Joeniarto dalam Syarifin (2005 : 97), asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasa disebut Swatantra atau Otonomi. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Adapun pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai bentuk upaya untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien dan merupakan salah satu bentuk Otonomi. Otonomi sendiri adalah suatu kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Hal tersebut juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi memiliki fungsi dan peranan yang cukup penting dalam mempercepat tercapainya tujuan Nasional Negara Indonesia yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum (masyarakat). Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki sejumlah kewenangan

dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri agar tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan nasional Indonesia. Dan ini akan memberikan sedikit ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah agar daerah menjadi lebih baik dan dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pemerintah daerah menjadi suatu wadah dalam memajukan kesejahteraan umum.

Dinas Sosial Kota Batu merupakan suatu unsur perangkat daerah dalam bidang sosial yang menangani masalah sosial mencakup seluruh masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam penanganan masalah sosial ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu melalui 2 bidang yaitu Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial. Dinas Sosial Kota Batu juga mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana dan penyusun kebijakan daerah dalam bidang sosial. Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Batu mengacu pada Visi dan misinya yaitu menuju masyarakat Kota Batu yang Produktif dan Sejahtera, menanggulangi kemiskinan, mencegah meluasnya pengangguran, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan pelayanan Publik dan penyelenggaraan tata Pemerintahan Daerah yang baik. Dalam prakteknya Dinas Sosial Kota Batu memberikan Standart Pelayanan Minimum terkait masalah-masalah kesejahteraan sosial, membantu meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu keluarga fakir miskin, anak jalanan, tuna asusila, gelandangan, anak terlantar,

keluarga berumah tidak layak huni dan beberapa masalah-masalah sosial lainnya. (Wawancara dengan Pak Didik Mei, 2017).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu masalah yang menjadi penyebab kemiskinan dan ini yang harus diselesaikan oleh Dinas Sosial Kota Batu untuk mewujudkan visi misi Dinas Sosial Kota Batu yaitu, Menuju masyarakat yang produktif dan sejahtera. Adapun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sendiri adalah suatu keadaan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Adapun hambatan itu dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, keterbelakangan, ketertinggalan dan perubahan lingkungan yang secara mendadak

Dan pada tabel dibawah ini kita dapat melihat data-data jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kota batu.

Rekapitulasi Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kota Batu
Tahun 2013-2015

Tabel 1.1 Data PMKS 2013

Tahun	No	Kecamatan	Jumlah
2013	1	Batu	1235
	2	Junrejo	1449
	3	Bumiaji	1522
Jumlah			4206

Data PMKS 2015

Tahun	No	Kecamatan	Jumlah
2015	1	Batu	1351
	2	Junrejo	1070
	3	Bumiaji	1266
Jumlah			3687

Sumber : Dinas Sosial Kota Batu

Berdasarkan pada data diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami telah mengalami penurunan dari tahun 2013 yang berjumlah 4.206 orang menjadi 3.687 orang pada tahun 2015. Akan tetapi pada tahun 2017 jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial kota batu mengalami kenaikan. (Wawancara dengan Pak Didik Mei, 2017). Oleh karena terjadinya peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial maka pembangunan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara terus-menerus dan bertahap guna meminimalkan dan meminimalisir jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Batu.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan sudah terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah serangkaian aktifitas yang sudah terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia (Suharto 2011 : 106), sedangkan dalam Suharto (2009:4) pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan

sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta untuk memperkuat instusi-instusi sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial sangat diperlukan bagi masyarakat di kota batu untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang layak dan bermartabat. Adapun sasaran dalam pembangunan ini adalah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk menentukan apakah kesejahteraan sosial itu berhasil atau tidak dapat dilihat dari kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial; serta dapat melakukan fungsi sosial..

Banyak hal yang menjadi penyebab adanya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya di Kota Batu. Salah satu penyebab utama yang paling besar adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan sendiri merupakan masalah yang paling sering di jumpai di berbagai daerah di Indonesia dimana kemiskinan menjadi pemicu penghambat proses pembangunan suatu daerah. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang dimana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa, Fakir miskin adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya sendiri dan/atau keluarga. Secara khusus, masalah kemiskinan sangat menyentuh dimensi kesejahteraan sosial seperti fakir miskin, anak dan lansia terlantar, dan lain sebagainya.

Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Batu memberikan perhatian secara serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan perlu membuat suatu program yang mengarah pada pemberantasan kemiskinan atau meminimalisir kemiskinan. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam meminimalisir atau memangkas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu sendiri dapat melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kembangkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Dengan kata lain pemberdayaan (*empowering*) adalah menciptakan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang mampu dan mandiri. Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu saja melainkan juga pranata-pranatanya.

Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan program harus membuat suatu program yang bertujuan untuk memangkas jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan memberdayakan masyarakat dengan baik agar

tujuan serta sasaran dalam mensejahterahkan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat terwujud. Maka dalam menumbuhkan kembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu adanya fasilitasi pemberdayaan yang memadai.

Berdasarkan pemaparan diatas, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang lebih serius melalui pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan hak para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan ini dimaksudkan agar masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memperoleh kesejahteraan sosial yang lebih baik yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk mengangkat sebuah judul **“Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Batu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat Pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dikatakan sebagai suatu tahapan yang bertujuan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir mahasiswa dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas, dan dapat dijadikan pembelajaran untuk memperdalam teori otonomi daerah, pemerintah daerah. Teori strategi, analisis dan interaktif, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan dan menganalisis strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan keadaan yang nyata (*rill*) nya dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Batu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat program ataupun kebijakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Batu Khususnya.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai sarana atau wahana bagi peneliti untuk memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan pengalaman yang lebih yang dapat menambah ilmu dalam berfikir.

E. Sistematikan Penulisan

Sistematikan penulisan merupakan susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah yang disusun secara garis besar guna mempermudah pembaca untuk mengetahui substansi yang terkandung di dalam karya ilmiah. Berdasarkan susunannya, Skripsi ini diuraikan ke dalam lima bab yang sistematikan dan alur pembahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar atau alasan dibuatnya karya ilmiah ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menyajikan teori-teori yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman yang digunakan dalam melaksanakan penyusunan karya ilmiah yang tentunya berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batu. Teori yang digunakan antara lain otonomi daerah, pemerintah daerah, teori strategi, analisis dan interaktif, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bab yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan tentang berbagai informasi mengenai hasil pembahasan dari penelitian, penyajian data, analisis data, dan gambaran umum yang ada.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan panduan atau pedoman dalam penulisan karya ilmiah dalam aspek konseptual teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep teori tentang strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batu.

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Pengertian administrasi menurut Sjamsuddin (2010:1-2) adalah, Sebagai berikut:

Kata “Administrasi” yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare* (Latin : *ad* berarti pada, *ministrare* berarti melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti dapat diartikan “memberikan pelayanan kepada”. Kata “Administrasi” juga berasal dari kata “*administration*” (*to administer*). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan pengelolaan atau penggerakan. Kata “Administrasi” juga dapat berasal dari bahasa Belanda *administratie* yang pengertiannya mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *beheer* (manajemen sumberdaya). Dari asal kata administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen.

Ketiga istilah diatas memiliki pengertian berbeda-beda.

Administrasi yang berasal dari Bahasa Latin memiliki pengertian kegiatan yang bersifat memberikan suatu pelayanan dimana pelayanan itu sesuai dengan ketentuan. Kata administrasi yang berasal dari bahasa Inggris

memiliki makna luas meliputi seluruh aktivitas untuk menetapkan suatu kebijakan serta pelaksanaannya. Sementara kata administasi yang berasal dari Bahasa Belanda memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan yang dimana sifatnya hanya pada kegiatan catat mencatat atau ketatausahaan.

Pengertian administrasi menurut Siagian dalam Syafiie (2006: 14) mengartikan bahwa “Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.” Sedangkan menurut Nawawi dalam Syafiie (2006: 14) menjelaskan bahwa administrasi merupakan serangkaian kegiatan sebagai suatu proses pengendalian usaha kerjasama suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Definisi dari administrasi menurut beberapa ahli diatas pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama, yaitu mengenai kerjasama, banyak orang, dan mencapai tujuan bersama. Artian yang dimaksudkan disini adalah pengertian administrasi secara luas sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit adalah administrasi merupakan kegiatan tatausaha yang berkaitan dengan catat mencatat.

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau yang biasa disebut dengan Administrasi Negara dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, administrasi publik memiliki beberapa makna, yaitu :

- a. H. E. Mc. Curdy dalam Sjamsuddin (2010: 114) mengartikan bahwa administrasi publik adalah suatu proses politik atau metode untuk memerintah suatu negara secara prinsipil.
- b. David. H. Rossenbloom dalam Sjamsuddin (2010: 116) mengartikan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.
- c. Nicholas Henry dalam Sjamsuddin (2010: 116) mengartikan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang memiliki tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah.
- d. George J. Gordon dalam Syafiie (2006: 25) menjelaskan bahwa administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang dilakukan organisasi atau perorangan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan peraturan yang berasal dari badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- e. Edward H. Litchfield dalam Syafiie (2006: 25) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan studi tentang bagaimana badan-badan pemerintah diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Menurut pengertian-pengertian dari beberapa ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya administrasi publik merupakan kombinasi antara teori dan praktek dengan tujuan untuk mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik juga dapat diartikan sebagai suatu proses politik yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan peraturan dari badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Orientasi dari administrasi publik saat ini lebih mengarah kepada kepentingan dan kekuasaan rakyat dan lebih ditekankan pada program aksi yang berorientasi kepada kepentingan publik. Peran administrasi publik dalam suatu pemerintah sangat vital yaitu dalam membantu membuat suatu program dan dalam mencapai tujuan suatu instansi pemerintah seperti memberdayakan masyarakat dan menciptakan suatu demokrasi. Administrasi publik dilaksanakan untuk memberikan pelayanan publik dan masyarakat harus dapat merasakan manfaatnya.

2. Fungsi-Fungsi Administrasi Publik

Menurut Tjokroamidoyo dalam Tjiptoherijanto dan Manurung (2010: 112), terdapat tiga fungsi utama dalam administrasi publik, yaitu :

a. Formulasi Kebijakan

Fungsi Formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan. Dalam formulasi kebijakan dibutuhkan konsistensi agar tercapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu/generasi, antar unit pemerintah.

- b. Pengaturan/Pengendalian Unsur-unsur Administrasi
Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola ialah organisasi, keuangan, kepegawaian, sarana-sarana lain. Pengendalian unsur-unsur administrasi adalah mengenai pengelolaan internal administrasi publik atau pengelola kapasitas administrasi publik.
- c. Penggunaan Dinamika Administrasi
Dinamika administrasi publik meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Peraturan/pengendalian unsur-unsur administrasi menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

Fungsi administrasi publik merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam administrasi publik. Formulasi kebijakan dilakukan agar suatu kebijakan dapat bermanfaat nantinya dan formulasi kebijakan ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang akan diambil dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengaturan/pengendalian unsur administrasi dipengaruhi oleh formulasi dari kebijakan itu sendiri. Proses implementasi dan evaluasi dari sebuah kebijakan akan lebih mempermudah dengan menggunakan pengendalian unsur administrasi publik yang dikelola organisasi dan kepegawaian dengan menggunakan kebijakan publik yang telah ada. Penggunaan dinamika administrasi sistem manajemen, organisasi, dan administrasi publik menjadi hal yang saling berhubungan. Dikatakan demikian karena dalam proses dinamika administrasi lebih menekankan pada aspek manajemen dimana di dalam aspek tersebut manajemen dipengaruhi oleh adanya organisasi.

3. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Menurut Handyaningrat (1994: 3-4) ruang lingkup administrasi dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu :

- a. Administrasi Negara (*Public Administration*) merupakan kegiatan/proses/usaha di bidang kenegaraan. Ruang lingkup dari administrasi negara terdiri atas :
1. Administrasi negara memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-sebaiknya kepada masyarakat (*Public Service*),
 2. Administrasi negara dalam mencapai tujuannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*legalistic approach*),
 3. Administrasi negara dalam kegiatannya mengutamakan kebenaran sesuai dengan prosedur yang ditentukan (*birokrasi-bureaucracy*).
- b. Administrasi Niaga (*Private/Business Administration*), merupakan kegiatan/proses/usaha yang dilakukan pada bidang niaga atau usaha. Administrasi niaga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan organisasi niaga dalam upaya untuk mencari keuntungan (*profit making*).

Berdasarkan kutipan dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi publik terdiri atas *public service*, *legalistic approach*, dan *birokrasi-bureaucracy*. Ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik sangat luas sehingga dapat juga mencakup ilmu-ilmu sosial lainnya. Syafiie (2006 :27-29) menguraikan ruang lingkup administrasi publik menjadi beberapa bidang, yaitu:

- a. Bidang hubungan meliputi: Administrasi Pemerintahan Pusat, Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Administrasi Pemerintahan Desa, Administrasi Pemerintahan Kotamadya, Administrasi Pemerintahan Kota Administratif, Administrasi Departemen, dan Administrasi Non-Departemen.
- b. Bidang kekuasaan meliputi: Administrasi Politik Luar Negeri, Administrasi Politik Dalam Negeri, Administrasi Partai Politik, posisi masyarakat LSM, dan Administrasi Kebijakan Pemerintahan.
- c. Bidang peraturan perundang-undangan meliputi: Landasan Idiil, Landasan Konstitusional, dan Landasan Operasional.
- d. Bidang kenegaraan meliputi: Tugas dan kewajiban negara, Hak dan Kewajiban negara, Tipe dan bentuk negara, Fungsi dan prinsip negara, Unsur-unsur negara, dan Tujuan negara dan tujuan nasional.
- e. Bidang pemikiran hakiki meliputi: Etika Administrasi Publik, Estetika Administrasi Publik, Logika Administrasi Publik, dan Hakikat Administrasi Publik.
- f. Bidang ketatalaksanaan meliputi: Administrasi Pembangunan, Administrasi Perkantoran, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Kemiliteran, Administrasi Kepolisian, Administrasi Perpajakan, Administrasi Pengadilan, Administrasi Kependudukan, dan Administrasi Perusahaan.

B. Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 Ayat 5 dan 6 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat”. Jadi disini pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya yang bertujuan untuk menjalankan fungsi sebagai otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kaloh yang dikutip oleh Kertiwa dan Nugraha (2012 :40). Kaloh menjelaskan pengertian otonomi daerah sebagai berikut:

“Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat, baik pada Negara Kesatuan maupun pada Negara Federasi. Otonomi daerah pada Negara Kesatuan lebih terbata daripada di Negara Federasi. Kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga daerah di Negara Kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat”.

Pada dasarnya setiap daerah mempunyai potensi masing-masing beraneka ragam. Potensi dan keanekaragaman itulah yang mampu mendorong

suatu daerah untuk bergerak maju dengan mengelola potensi-potensi yang ada. Pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat bertujuan agar daerah bisa dan mampu untuk mengelola potensi yang daerah yang dimiliki. Otonomi daerah yang dijalankan dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Kertiwa dan Nugraha (2012 :78) mengungkapkan pengertian otonomi daerah yang berbeda yaitu sebagai berikut:

“Otonomi daerah merupakan perwujudan strategi pembangunan dari bawah dengan sumber daya manusia sebagai sentral pembangunan guna memberi kemungkinan untuk mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan sesuai dengan kondisi wilayah masyarakat pada waktu tertentu (*Spacial Approach*). Otonomi daerah merupakan perwujudan strategi pembangunan partisipatif guna memberikan kesempatan masyarakat disuatu daerah untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pemerintah daerah”.

Salah satu tujuan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu tercapainya daerah yang mandiri yang mampu mengelola potensi yang ada pada daerahnya sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kertiwa dan Nugraha (2012 : 78), tujuan otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

“Tujuan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi dan kreasi daerah dengan cara-cara yang sesuai serta memanfaatkan keragaman budaya sebagai aset pembangunan nasional. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya dimaksudkan untuk menuai manfaat yang dapat dirasakan bagi kesejahteraan rakyat, *economic efficiency, maximizing utilization of scarcity of resource*, menciptakan lapangan kerja, perbaikan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonom.”

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah yang diberikan kewenangan otonomi daerah atau yang disebut daerah otonom berhak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan daerahnya sendiri tanpa adanya campur

tangan dari pihak pemerintah pusat maupun pihak lainnya. Dengan begitu setiap daerah diharapkan mampu untuk memecahkan permasalahan daerahnya sendiri dan mampu menjadikan daerah yang mandiri, baik mandiri *financial* maupun mandiri dalam ekonomi dan politik. Dengan kata lain adanya otonomi daerah ini akan memacu daerah otonom untuk membuat suatu kebijakan atau membuat suatu program untuk memecahkan masalahnya daerahnya. Sehingga tidak perlu lagi menunggu dari pemerintah pusat melainkan dapat diselesaikan langsung oleh pemerintah daerah dan ini akan menjadikan pemecahan suatu masalah dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.

C. Pemerintah Daerah

1. Pengeritan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintah daerah dibagi menjadi dua urusan, yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah wajib dibagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Hal ini dipaparkan dalam Undang-Undang No 23 Pasal 12 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan meliputi:
 - a. Pendidikan;

- b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial
2. Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertahanan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanam modal;
3. Urusan pemerintah pilihan meliputi :
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;

- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

2. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengatur daerah nya maupun dalam membuat regulasi daerah. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan peran pemerintah sebagai pelayan publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah menurut Musgrave dan Musgrave yang dikutip dalam Muluk (2009 :113) yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods*, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai *private* maupun *public goods*, dan menentukan komposisi dari *public goods*. Regulasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi ini.

b. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata.

c. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laku pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Dari penjelasan diatas, dapat dipaparkan bahwa pemerintah mempunyai tiga peranan yaitu sebagai pengalokasi dengan menyediakan barang-barang publik sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, pemerintah sebagai pendistribusi kekayaan yang dimiliki oleh daerah supaya tersebar ke seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali dan kekayaan alam dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dan peran pemerintah terakhir adalah sebagai stabilitator yaitu pemerintah yang melakukan pengendalian laju pertumbuhan ekonomi dan tetap melakukan pengawasan terhadap harga serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan kata lain bahwasannya pemerintah daerah memiliki peranan sebagai penyedia barang public yang dibutuhkan oleh masyarakat selain dari itu pemerintah juga harus menjadi stabilitator dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi dan melakukan pengawasan dan harus menyediakan lapangan pekerjaan.

D. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) merupakan suatu istilah yang tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah kesejahteraan sosial dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung pada suatu waktu tertentu. Istilah kesejahteraan sosial juga dapat berbeda-beda antara satu ahli dengan ahli yang lainna, karena persepsi dan ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang berbeda. Menurut James Midgley

(2005 :5) mengartikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang diharapkan harus mampu mengatur masalah sosial dengan baik karena setiap orang belum tentu memiliki kemampuan manajemen yang baik terhadap masalah sosial yang mereka hadapi. Baik kaya maupun miskin pasti akan menghadapi suatu masalah, akan tetapi mereka mempunyai cara dan kemampuan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ukuran kesejahteraan atau tidak seseorang tergantung kepada kemampuannya menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- b. Setiap individu, keluarga, dan kelompok serta masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, akan tetapi menyangkut dalam hal keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan, dalam pergaulan dan kebutuhan non-ekonomi lainnya.
- c. Untuk merealisasikan setiap potensi yang ada dari anggota masyarakat perlu diadakannya langkah untuk memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah perlu memperbesar peluang tersebut dengan meningkatkan program pendidikan maupun dengan menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh apa yang ingin dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwasannya kesejahteraan sosial itu merupakan suatu kondisi masyarakat dimana

masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, mampu memenuhi kebutuhan pokoknya ditambah lagi dia memiliki penghasilan dan pekerjaan.

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (2012 :10), kesejahteraan sosial mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Dengan kata lain kesejahteraan sosial dapat dikatakan sudah tercapai apabila standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial sudah terpenuhi dengan baik dan maksimal ditambah lagi sudah memiliki taraf hidup yang sudah meningkat, itulah tujuan dari kesejahteraan sosial.

E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dan berdaya adalah kondisi atau keadaan yang mendukung

adanya kekuatan dan kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kemampuan kepada masyarakat untuk mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitarnya. Adapun pengertian pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004 :79) adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk membangkitkannya.

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya hanya mengacu pada kata “Empowerment” yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini seperti yang dikutip Sumordiningrat dalam Mardikarto dan Soebianto (2012:47) bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi dalam pembangunan yang berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara proporsional.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama dalam pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya yang lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi diri sendiri, maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (Suharto, 2005 : 60). Hal ini

selaras dengan pendapat Sulistiyan (2004 :80) yang menyatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Dengan penjeleas diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemberdayaan itu merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan suatu potensi dari seorang individu maupun kelompok agar memiliki keahlian, dimana keahlian itu akan menjadikan mereka sebagai masyarakat yang mandiri.

3. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Menurut pendapat Suharto (2005:58) yang menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.”

Dengan kata lain sasaran dari pemberdayaan itu adalah masyarakat itu sendiri, masyarakat yang kebutuhan pokok dasarnya tidak dapat dia penuhi dan masyarakat itu juga tidak memiliki keahlian dalam bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jadi inilah yang menjadi sasaran utama dalam proses pemberdayaan.

4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Driver dan Sajise dalam Sutrisno (2005 :18) ada lima macam, yaitu :

- a) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) : pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b) Partisipasi (*Participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c) Konsep berkelanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d) Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.
- e) Keuntungan sosial dan ekonomi : merupakan bagian dari program pengelolaan.

5. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 1987:63):

1. **Tahap Persiapan.** Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community

woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2. **Tahapan pengkajian (assessment).** Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. **Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.** Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. **Tahap pemformalisasi rencanaaksi.** Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
5. **Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.** Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
6. **Tahap evaluasi.** Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
7. **Tahap terminasi.** Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Berdasarkan penjelasan diatas adapun tahapan dari pemberdayaan adalah

antara lain, melakukan persiapan, pengkajian, perencanaan, pemformalisasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Dimana tahapan ini merupakan langkah yang akan dilalui dalam proses atau tahapan dari pemberdayaan itu sendiri.

6. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife yang dikutip dalam Zubaedi (2007 :45) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan dengan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas.

Terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh pihak yang memberdayakan atau pelaku pemberdayaan. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan menurut Suharto (2005:67) yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu :

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah.

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak jatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan teori diatas adapun maksud dari upaya pemberdayaan ini adalah untuk memungkinkan yang dimana maksudnya untuk menciptakan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki keahlian untuk bekerja menjadi memiliki skill bekerja yang dimana hal itu akan menjadikan masyarakat itu bisa jadi mandiri. Ditambah lagi pemberdayaan itu akan menjadi sarana untuk menguatkan masyarakat yang memiliki ekonomi rentan karena tidak memiliki pekerjaan, adanya pemberdayaan ini akan menjadikan masyarakat memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan. Pemberdayaan ini juga akan menjadi wadah untuk berlindung dan sebagai penyokong agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan ini juga akan menjadi tempat pemeliharaan kondisi yang kondusif antar sesama masyarakat.

F. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya baik jasmani,

rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

2. Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia, saat ini tercatat ada 26 jenis kategori Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan batasan pengertian sebagai berikut.

1. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah yang ditelantarkan orangtuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orangtuanya/ keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu;
2. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
3. Anak berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana;

4. Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari;
5. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental;
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS;
7. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial;

8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental;
9. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa;
10. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum;
11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan mengharapkan belas kasihan orang lain;
12. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurlang barang-barang bekas;
13. Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian;

14. Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal;
15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih optimal;
16. Korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA;
17. Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga maupun kelompok yang mengalami tindak kekerasan, baik akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi

yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu;

19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial;
20. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
21. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
22. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seseorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;\

23. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan;
24. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami dan istri, orangtua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar;
25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi syarat yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial;
26. Komunitas Adar Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Metode penelitian dapat menentukan secara pasti arah kegiatan penelitian itu sehingga dapat tercapai tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian merupakan suatu cara ilmiah guna memecahkan suatu permasalahan dan untuk menembus batas-batas ketidaktahuan. Metode penelitian adalah suatu cara untuk melaksanakan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan, dan menguji masalah yang diteliti. Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga fakta tersebut dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasilnya dapat dinikmati serta digunakan untuk kepentingan manusia (Riduwan, 2003 : 1).

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti, jenis penelitian yang digunakan peneliti ini adalah penelitian kualitatif. Meloeng (2004) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya motivasi, perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Maka dari

itu peneliti menggunakan metode kualitatif dalam memaparkan atau menjelaskan dan menganalisis Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Batu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang mendalam dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian ini dilaksanakan. Peneliti memilih metode ini untuk mendapatkan informasi secara langsung dilapangan, sehingga mendekatkan peneliti dengan objek peneliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasaan dalam merpersepsikan dan mengkaji subjek masalah yang diteliti. Peneliti kualitatif menghendaki adanya penetapan batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh, batas menentukan kenyataan guna mempertajam fokus dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus (Meleong, 2009 :12). Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kota Batu.

A. Tahapan Pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kota Batu

- a. Tahap Persiapan.
- b. Tahapan pengkajian (assessment).
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.
- d. Tahap pemfomalisasi rencanaaksi.

- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.
- f. Tahap evaluasi.
- g. Tahap terminasi.

B. Bentuk-bentuk Pemberdayaan

- 1) Pelatihan Kerja
- 2) Permodalan
- 3) Penyuluhan

C. Aktor-aktor yang terlibat

- 1) Dinas Sosial Kota Batu
- 2) Kepala Desa
- 3) Pekerja Sosial Masyarakat
- 4) Teknisi Pengajar
- 5) Masyarakat PMKS

2. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batu, meliputi :

A. Faktor Pendukung

- 1) Faktor Internal
 - a. Visi-Misi
 - b. Anggaran Skala Prioritas
 - c. Sarana Prasarana

B. Faktor Penghambat

- 1) Faktor Internal
 - a. Landasan Hukum Daerah
 - b. Anggaran
 - c. Data Dinamis
- 2) Faktor Eksternal
 - a. Pemikiran Masyarakat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak atau tempat peneliti menuangkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Batu.

Situs penelitian merupakan tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data atau informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dan sesuai dengan fokus peneliti yang ingin diteliti oleh peneliti. Maka dari itu situs penelitian pada penelitian ini adalah pada Dinas Sosial Kota Batu.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data keberadaanya memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu maka penelitian ini menentukan siapa saja dan data apa saja yang harus didapatkan untuk menjawab fokus dan tujuan penelitian ini. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama (Narasumber) baik dari individu atau perorangan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian maupun permasalahan yang ada. Data primer diperoleh peneliti langsung dari informan terkait dengan strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat kesejahteraan sosial. Adapun subjek sebagai sumber data primer yang akan diambil oleh peneliti adalah pihak-pihak yang terkait dengan strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Batu yang dimaksud adalah masyarakat dan pegawai pemerintah dinas sosial kota batu.

Berdasarkan penjelasan data diatas sumber data primer yang dipilih peneliti adalah antara lain : kepala bidang, pekerja sosial, masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan melalui dokumen atau arsip dan laporan yang akan melengkapi dan akan memperkaya sumber data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data sebagai bahan untuk disajikan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode atau cara pengumpulan data, antara lain :

1. Wawancara langsung (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan cara peneliti langsung berhadapan dengan pihak narasumber untuk melakukan proses tanya jawab yang lebih lanjut dan memperjelas fakta data serta informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dengan bantuan panduan wawancara (*interview guide*).

2. Observasi

Observasi yaitu suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian agar data yang diperoleh lebih akurat dari sumber data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai dokumen, baik berupa buku, dokumen, laporan, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen tertulis dari instansi yang menjadi lokasi penelitian dan dari pendapat ahli-ahli berbagi tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

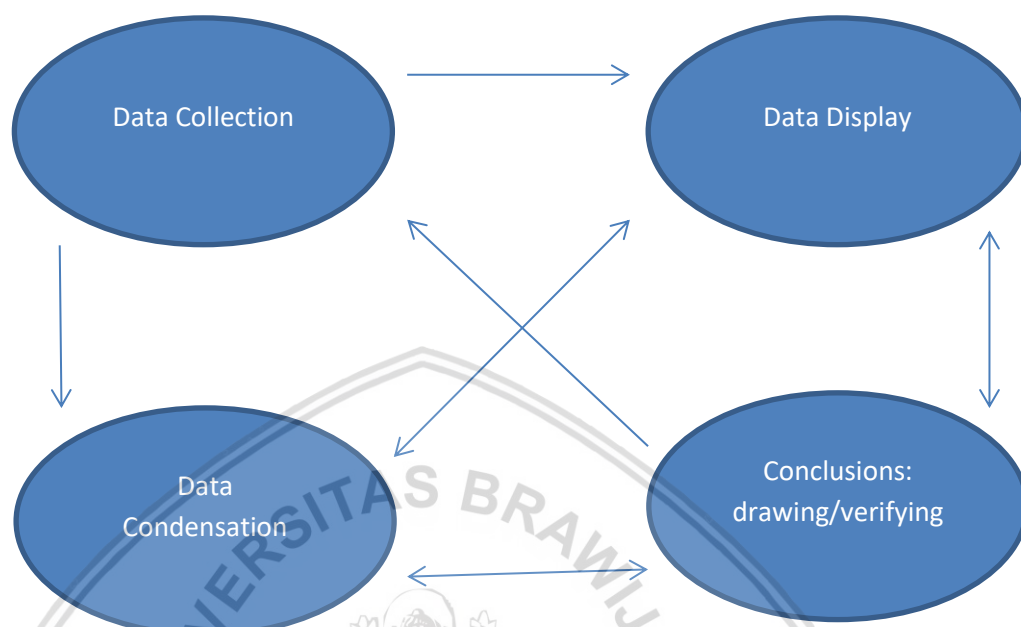
Instrumen penelitian yaitu merupakan alat bantu penelitian bagi peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian kualitatif yaitu instrumen peneliti dimana itu sendiri atau bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpulan data yang utama. Menurut Sugiyono (2015:222) menyatakan bahwa dalam penelitian

kualitatif, yang menjadi instrumen peneliti adalah peneliti itu sendiri. Maksudnya disini adalah peneliti harus paham terhadap metode kualitatif yang digunakan, menguasai teori dalam permasalahan yang akan diteliti dan harus siap memasuki objek penelitian.

Penjelasan mengenai instrumen penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti itu sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera peneliti itu sendiri untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang terdapat dilapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian yang ingin diteliti.
2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*) yaitu suatu catatan secara sistematis yang dibuat oleh peneliti ketika melakukan pengamatan, wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu pada saat penelitian dilakukan,
3. Perangkat penunjang adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat yang dimiliki seperti alat tulis, fotokopi, kamera, dan peralatan lainnya yang dapat digunakan pada saat penelitian.

G. Metode Analisis Data



Gambar 3.1 : Analisis Data : Model Interaktif

Sumber :Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

1. Data Condensation (Data Kondensasi)

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, abstrak, dan/atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh (*body*) dari catatan tertulis lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan penyederhanaan dan pemilihan data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan dari hasil wawancara dilapangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang ingin diteliti. Pemilihan data perlu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya data-data yang tidak diperlukan karena dari kemungkinan besar dari banyaknya data yang diperoleh tidak semuanya sesuai dengan judul penelitian. Data yang akan diambil oleh peneliti adalah

strategi-strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu serta faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan strategi tersebut.

2. *Data Display* (Display Data)

Aliran kedua kegiatan analisis data adalah tampilan/display data. Melihat display membantu kita untuk memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu baik menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.

3. *Drawing/Verifying* (Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam penulisan adalah penulisan penelitian analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap awal pengumpulan data, peneliti mulai melakukan untuk mencari arti dan makna-makna benda, keterangan atau penjelasan, sebab-akibat, dan proposisi.

H. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan keabsahan data dengan derajat kepercayaan dan keteralihan. Penerapan kriteria derajat kepercayaan (*kredibilitas*) memiliki dua fungsi yaitu: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan bisa dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kediri dan Malang-Jombang. Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut.

Sebutan kata “ Kota Batu” tidak akan terlepas dari kata wisata yang sering disebut oleh masyarakat. Sebagai pemerintahan daerah yang tergolong muda, kota Batu dianugerahi berbagai potensi oleh sang pencipta. Potensi alam yang mempesona menjadi devisa bagi dunia pariwisata yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena adanya keindahan alam yang memikat, kota Batu sangat serius membangun sarana dan prasarana sebagai penopang pendapatan asli daerah dari sektor wisata.

Secara astronomi, Kota Batu terlihat berada pada posisi $7^{\circ} 55' 20''$ - $7^{\circ} 57' 20''$ Bujur Timur, $115^{\circ} 17' 0''$ - $118^{\circ} 19' 0''$ Lintang Selatan.⁴⁷ Sedangkan batas wilayah kota Batu, meliputi:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang

Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Bumiaji merupakan

kecamatan yang paling luas wilayahnya yaitu 12.797,89 ha sedangkan Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo masing-masing luas wilayahnya 4.545,81 ha dan 2.565,02 ha.

Kota Batu terletak di kaki gunung Paderman yang letaknya 700-1100 m di atas permukaan laut. Daerah dengan suhu dingin, ketika musim dingin suhunya 15°-19° C, ketika musim panas suhunya 28° C. Dan ketika pagi dan sore hari kota ini seringkali diselimuti kabut. Kota Batu terbagi habis menjadi 3 kecamatan, 24 desa /kelurahan, 231 RW dan 1.092 RT. Dilihat komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu masing-masing 9 desa/kelurahan. Banyaknya jumlah desa/kelurahan yang dimiliki tidak otomatis menjadi daerah dengan jumlah RW dan RT terbanyak pula. Terbukti jumlah RW dan RT terbanyak di Kecamatan Batu yaitu masing-masing 91 RW dan 427 RT. Berikutnya Kecamatan Bumiaji 81 RW dan 426 RT dan sisanya berada di Kecamatan Junrejo. Sekretariat Pusat Paguyuban Darma Bakti yang diteliti dalam skripsi ini ada di Kelurahan Songgokerto, Dusun Tambuh, Kecamatan Batu. Berikut ini tabel jumlah desa dan/atau kelurahan, RW dan RT Kota Batu:

b. Sejarah Kota Batu

Kota Batu yang sekarang ini dikenal sebagai Kota Wisata memiliki sejarah panjang, Kota Batu resmi berdiri pada tahun 2001, hasil pemekaran kota Malang. Kota Batu merupakan bagian dari dataran tinggi Malang yang terbentuk dari endapan lava yang menjadi danau. Sejak abad ke 10, wilayah

Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Pasalnya, wilayah Kota Batu berada di daerah pegunungan yang memiliki hawa dan udara yang sejuk dan ditambah dengan pemandangan Kota Batu yang indah.

Berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama "B A T U" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut. Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur.

Pada sekitar tahun 1767 M, modernisasi Batu sebagai daerah baru mulai tumbuh dan berkembang. Hal itu berbarengan dengan masuknya VOC dalam membuka lahan perkebunan di Batu.

c. Lambang Kota Batu

Gambar 4.2 Logo Kota Batu



Sumber: *batukota.go.id*

➤ **Gambar Bintang**

Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna meskipun berbeda suku, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi kerukunan umat beragama

➤ **Gambar Padi dan Kapas**

melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari padi berjumlah 17 dan kapas berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan bulan peresmian Kota Batu

➤ **Gambar Gunung**

melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu Kota Batu berada pada lereng Gunung Panderman, gunung Arjuno, dan Gunung Welirang yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang menyatu menjadi sungai brantas, serta keanekaragaman flora dan fauna sehingga menjadi daya tarik wisata

➤ **Gambar Keris**

Berwarna keemasan dengan posisi tegak yang melambangkan jiwa ksatria, kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan yang pantang menyerah serta kepribadian yang berbudaya untuk mencapai Kota Batu kedepan

➤ **Gambar Rantai**

Warna hitam yang melambangkan Persatuan dan Kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga diartikan bahwa hubungan antara Manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah unsur yang tidak terpisahkan.

➤ **Gambar Candi**

Melambangkan sistem pemerintahan Kota Batu yang tertib, rapi, dan teratur.

➤ **Warna Dasar Hijau**

Dengan gambar filosofi petak-petak sawah melambangkan Kota batu adalah daerah Agraris, mengandung arti filosofi "Gemah Ripah Loh Jinawi" (Daerah subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani.

➤ **Gambar Air**

Melambangkan subur kehidupan yang lestari.

➤ **Bentuk Perisai**

Memiliki 5 sisi yang melambangkan pemerintah Kota Batu berdasarkan Pancasila sebagai Dasar negara Republik Indonesia.

➤ **Warna Merah Putih**

Melambangkan Bendera Indonesia.

➤ **Tulisan Kota Batu**

Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Batu.

➤ **Hakaryo Guno Mamayu Bawono**

Merupakan makna Condro Sengkolo yang mengandung arti Berkarya

Guna Membangun Negara. Condro Sengkolo 1934 adalah Tahun Jawa

yang merupakan peresmian Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata :

Hakaryo = 4, Guno = 3, Mamayu = 9, Bawono = 1 berjumlah 17, sebagai

tanggal peresmian Kota Batu, dengan jumlah suku kata 11 bermakna dasar

Hukum peresmian Kota Batu diatur dalam UUN 11 Th 2001.

d. **Visi-Misi Kota Batu**

VISI

**“KOTA BATU SENTRA PERTANIAN ORGANIK
BERBASIS KEPARIWASATAAN INTERNASIONAL”**

Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepatguna dan Berdaya Saing
Ditopang Sumberdaya (Alam, Manusia Dan Budaya) Yang Tangguh
Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai
Oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

MISI

- 1) Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama
- 2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

- 3) Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil
Pertanian Organik
- 4) Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi
Kota Kepariwisata Internasional
- 5) Optimalisasi Pemerintahan Daerah
- 6) Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan
- 7) Peningkatan Kualitas Kesehatan
- 8) Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran
Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas
- 9) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
- 10) Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang
Harmonis Dan Demokratis
- 11) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Sejarah dan Gambaran Umum Dinas Sosial

Kota Batu terletak 800 meter diatas permukaan laut dan terbentuk berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2001 dengan 3 kecamatan yang meliputi kecamatan Batu, kecamatan Bumiaji, dan Junrejo dan luas wilayah 202.800 km². Tidak dapat dipungkiri bidang pariwisata merupakan bidang unggulan yang terintegrasi dengan bidang pembangunan yang lain. Potensi wisata yang terus dieksplorasi saat ini tidak akan berhasil dengan baik ketika masalah sosial kemasyarakatan seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran,

pengemis jalanan, dan masalah sosial lainnya tidak tertangani dengan baik. Bidang ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian seiring banyaknya perusahaan wisata yang berdiri merupakan suatu peran dari Dinas Sosial.

Dinas Sosial yang secara konstitutif melaksanakan amanat pasal 27 ayat (2), pasal 28D ayat (2), pasal 28E ayat (1), pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 ayat (1) huruf g dan huruf h UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Kota batu ini juga terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah kota Batu No 5 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja dinas kota Batu yang dijabarkan kembali dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 39 tahun 2013.

a. Logo Dinas Sosial



Gambar 4.3 Logo Dinas Sosial Kota Batu

Sumber : *Dinsos.batukota.go.id*

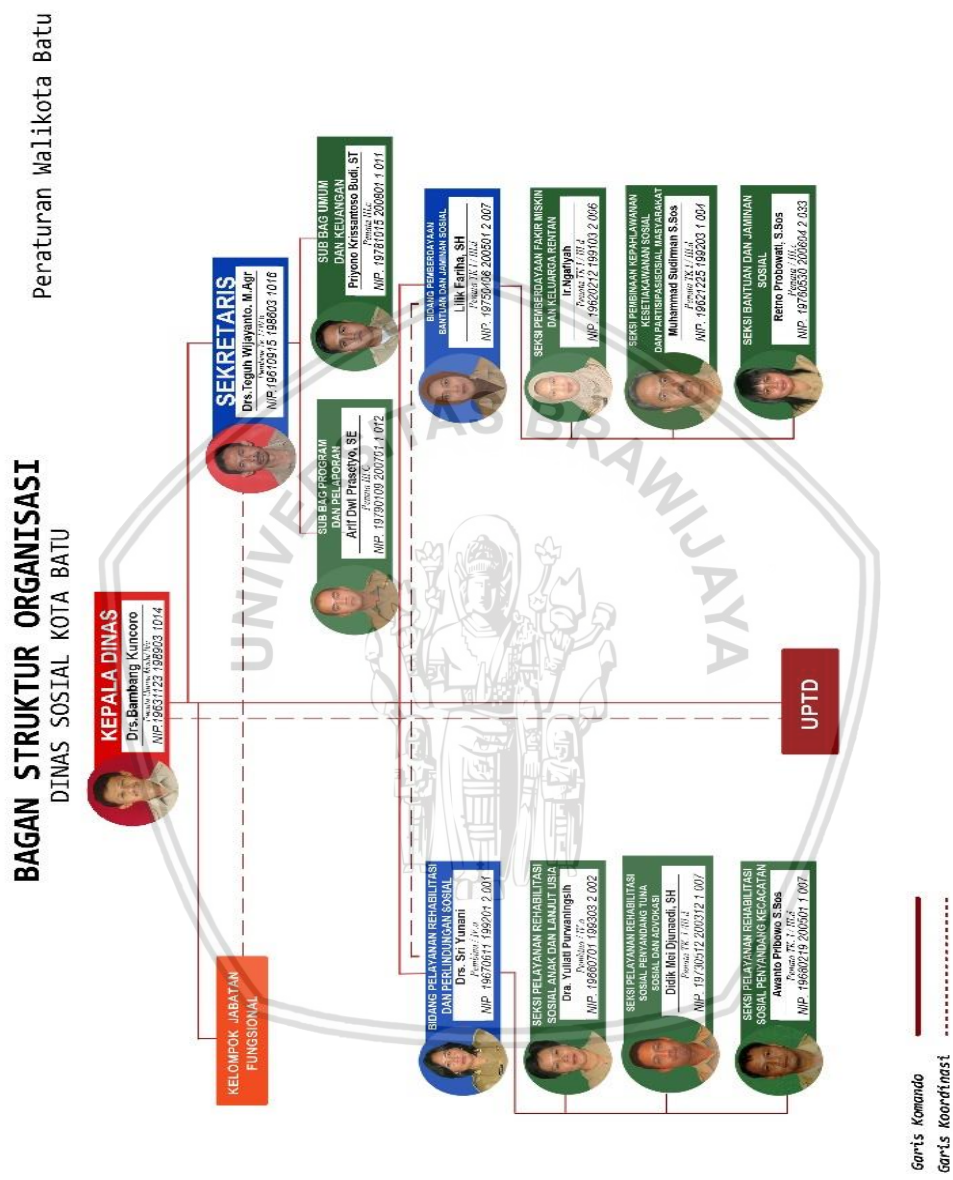
Bentuk teratai dengan lima kelopak yang menjadi satu kesatuan menggambarkan Pancasila dengan makna bahwa Departemen Sosial bersikukuh mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk grafis persegi dengan empat sayap

burung garuda menggambarkan kandungan filosofis pelayanan sosial melalui empat pilar yaitu : rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. Bentuk manusia mengandung arti pemanusiaan itu sendiri, yang merupakan subjek dan objek dari pelayanan sosial, dan mengusung kredibilitas dan jati diri untuk memanusiakan manusia.

b. Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan struktur organisasi (Gambar 4.4), organisasi Dinas Sosial terdiri atas Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Keuangan. Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia, dan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial dan Advokasi, dan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Kecacatan. Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial yang membawahi Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Keluarga Rentan, Seksi Pembinaan Kepahlawanan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sementara masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub-bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Hubungan tata kerja antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui sekretaris.

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Batu



Sumber: Dinas Sosial Kota Batu (2018)

Tabel 4.1 Daftar Pegawai Dinas Sosial Kota Batu

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Bambang Kuncoro	Kepala Dinas Sosial
2	Drs. Teguh Wijayanto, M.Agr	Sekretaris
3	Priyono Krissantoso Budi	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan
4	Theresia Kartika Lukito P.,SE	Penata Laporan Keuangan
5	Abd.Aziz Maulani	Pengelola Kepegawaian
6	Very Iswanto	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
7	Nur Syuhadak	Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan
8	Yuyun Ni'matul Ulfa	Pengolah Data Laporan Keuangan
9	Rohmawati	Administrasi Surat Masuk-Keluar
10	Arif Dwi Prasetyo	Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan
11	Deny Sumatra Kusuma A	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan
12	Annisa'u Rizka Amalia	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan
13	Sirly Purdiani	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan
14	Sri Yunani	Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial
15	Yuliati Purwaningsih	Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia
16	Hartono	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dan Lansia

17	Agus Sukaton	Pengolah Data
18	Edi Winarto	Pengolah Data
19	Indra Tri Ariyono	Pengolah Data
20	Didik Mei Djunaedi	Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial Dan Advokasi
21	Dian Wahyu Purwiasuti	Pengolah Data
22	Yokobus Setiawan,St	Pengolah Data
23	Awanto Pribowo	Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Kecacatan
24	Viny Savitri	Pengelola Rehabilitasi Sosial
25	Lilik Fariha	Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan Dan Jaminan Sosial
26	Ngafiyah	Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Keluarga Rentan
27	Khotijah Yuliati	Pengelola Kesejahteraan Sosial
28	Citra Ayu Rahmanda	Pengolah Data Kesejahteraan Sosial
29	Muhammad Sudirman	Kepala Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial Dan Partisipasi Sosial Masyarakat
30	Didik Feridjanto	Pengelola Data

31	Purwo Adi Sulistyo	Pengolah Data
32	Retno Probawati	Kepala Seksi Bantuan Dan Jaminan Sosial
33	Edi Suyantono	Pengelola Data Bantuan Sosial
34	Mulyanto	Pengolah Data

Sumber : Dinas Sosial Kota Batu (2018)

c. Visi Misi Dinas Sosial

1. Visi Dinas Sosial Kota Batu

“ Menuju masyarakat kota Batu produktif dan sejahtera”

2. Misi Dinas Sosial Kota Batu

- Menanggulangi kemiskinan.
- Mencegah meluasnya pengangguran.
- Meningkatkan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan pelayanan Publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan Daerah yang baik (*Good Local Governance*).

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batu merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Batu, dimana program ini memiliki tujuan untuk mencapai terwujudnya visi misi Dinas Sosial Kota Batu yaitu menuju masyarakat kota batu yang produktif dan sejahtera.

Visi Misi Dinas Sosial

- a) Visi Dinas Sosial Kota Batu
“ Menuju masyarakat kota Batu produktif dan sejahtera”
- b) Misi Dinas Sosial Kota Batu
 - 1. Menanggulangi kemiskinan.
 - 2. Mencegah meluasnya pengangguran.
 - 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial.
 - 4. Meningkatkan pelayanan Publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan Daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Selain untuk mencapai visi misi Dinas Sosial Kota Batu, Pemberdayaan ini juga memiliki tujuan untuk meminimalisir jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu. Dengan cara memberikan pelatihan kepada mereka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar mereka memiliki suatu potensi atau kemampuan sehingga mereka dapat memiliki pekerjaan.

Sesuai dengan visi dan misi diatas dapat diartikan bahwa Dinas Sosial Kota Batu harus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, mencegah meluasnya pengangguran, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk mencapai visi misi itu salah satu langkah atau cara yang diambil oleh dinas sosial untuk menciptakan masyarakat kota batu yang produktif dan sejahtera adalah dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Pemberdayaan ini ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dikarenakan mereka yang masuk dalam Kategori PMKS tersebut rata-rata susah untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan mereka tidak memiliki pendidikan yang memadai, selain pendidikan yang tidak memadai, mereka juga tidak memiliki skill dan modal dalam berwirausaha seperti contohnya anak jalanan, fakir miskin, anak punk dan lain-lain.

Adapun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS terdiri dari 26 Kategori, akan tetapi di kota batu sendiri hanya ada sekitar 19 jenis pmks, hal ini dijelaskan oleh Ibu Sri Yunani dalam wawancara.

“Baik gini mas yo di kota batu itu dalam penanganannya ada 26 jenis pmks tapi di kota batu sendiri hanya ada 19 jenis saja. Dan itu dapat mas lihat dari data jumlah pmks yang ada, dimana hanya ada 19 jenis saja yang terdata dalam data PMKS di Kota Batu. Nah, Apa yang

gak ada? Masyarakat terasing pedalaman itu gak ada, imigran gak ada, wanita tuna susila gak ada? Wanita susil sebenarnya ada tapi gak boleh didata oleh dinas sosial. Kenapa.? itu berdasarkan pergub tahun 2014 bahwa jawa timur bebas dari wanita tuna susila.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Selain dari penjelasan dari Ibu Sri Yunani, ternyata hal itu juga didukung oleh penjelasan dari Pak Didik Mei

“Masalah kategori PMKS yang ada di Kota Batu dapat dilihat dari data yang sudah tersedia itu mas, jadi dari data-data itu hanya ada 19 jenis Kategori PMKS yang terdata.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Untuk mewujudkan visi misi Dinas Sosial Kota Batu tentu Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah harus membuat program untuk mengurangi jumlah PMKS di Kota Batu, untuk meminimalisir PMKS di Kota Batu harus diselesaikan secara bertahap, dimana dalam proses penyelesaiannya itu didasarkan pada kategori mana yang paling banyak. Ini ditegaskan oleh Ibu Sri Yunani:

“Tahun 2017, tidak semua sasaran jenis kategori pmks itu bisa diselesaikan mas, ya walaupun sebenarnya kepengen semuanya harus diselesaikan tetapi karena keterbatasan anggaran, sehingga kita pilih yang bisa menjadi ikon dalam artian yang memiliki masalah sosialnya yang banyak.” (Wawancara dengan Ibu Sri Yunani)

Dengan penjelasan wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwasannya pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Batu akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki jumlah PMKS yang terbanyak.

a. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan merupakan suatu tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial itu sendiri untuk melaksanakan program pemberdayaan. Adapun Proses pemberdayaan yang dilaksanakan di Kota Batu menurut Dinas Sosial Kota Batu, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Yang harus diketahui adalah data, jadi Dinas Sosial akan melakukan pendataan jumlah PMKS.
2. Kebutuhan, dan adanya isu yang ada di pmks itu apa.? Misalkan, isunya pmks banyak di kota batu. Berkeliaran dan tidak memiliki pekerjaan atau mengganggu lingkungan seperti pengemis, anak jalanan dengan kata lain Dinas Sosial akan melakukan Razia.
3. Mengadakan musrembang dari desa,kecamatan, kota. Kenapa demikian.? Dari hasil musrembang kita dapat mengetahui masalah sosial yang ada didesa dan harus diapakan ini. Setelah adanya musrembang akan dibuat program dan itu akan disesuaikan dengan RPJMD, kita masuk program mana .? apakah usulan-usulan dari desa, kecamatan dan kota masuk kedalam RPJMD
4. Pemberdayaan dari proposal yang masuk dengan kata lain sesuai dengan permintaan masyarakat. Bagaimana cara menentukannya.? Dengan cara skala prioritas, yang mana yang paling banyak akan diutamakan. Setelah itu akan dicek ke lokasinya apakah desa ini benar membutuhkan pemberdayaan dan apakah data-data yang dimasukkan dalam proposal itu benar atau tidak,benar gak orangnya atau tidak. Setelah itu baru akan dilakukan pemberdayaan dengan syarat jani sarana-prasarana atau alat yang diberikan tidak akan dijual.
5. Setelah data, isu dan hasil dari musrembang dan proposal sudah diterima, maka Dinas Sosial akan melakukan Perencanaan akan seperti apa program pemberdayaan itu dilakukan.
6. Setelah perencanaan sudah dibuat, langsung kepelaksanaan pemberdayaan.
7. Setelah pemberdayaan terlaksana, Dinas Sosial akan mengawasi orang-orang yang sudah diberdayakan tadi agar sarana prasarana yang diberikan tidak disalah gunakan dimana pengawasan ini dilaksanakan minimal 1 tahun.
8. Selain mengawasi Dinas Sosial juga akan membantu usaha dari orang yang diberdayakan tadi untuk di promosikan di Lingkungan Kota Batu (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB)

Dari pemaparan diatas dapat diartikan bahwasannya dalam melaksanakan pemberdayaan harus ada data PMKS dimana tujuannya untuk menyesuaikan prosedur pemberdayaan, dimana pihak Dinas Sosial Kota Batu memberikan kuota minimal agar suatu program pemberdayaan itu dilaksanakan. Seperti yang dijelaskan oleh pak Didik Mei dalam wawancara.

“dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, minimal orang yang akan diberdayakan itu berjumlah 10 orang, baru pemberdayaan itu akan dilaksanakan mas, apabila jumlah peserta pemberdayaan itu kurang dari 10 orang maka pemberdayaan itu tidak dapat dilaksanakan” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Penjelasan dari pak Didik Mei diatas juga dijelaskan kembali oleh Pak Andik selaku pendamping dalam pelaksanaan pemberdayaan PMKS.

“masalah pelaksanaan program pemberdayaan mas, minimal setidaknya ada 10 masyarakat yang mau dan bersedia untuk diberdayakan mas, dengan adanya 10 masyarakat baru program pemberdayaan ini dapat dilaksanakan.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2018 pukul 13.00 WIB di Kelurahan Sisir)

Dan untuk memperoleh data PMKS yang akan diberdayakan, Dinas Sosial melakukan 2 cara yaitu melakukan razia dan menerima proposal dari kelompok masyarakat PMKS hal ini dijelaskan dalam wawancara oleh pak Didik Mei

“Jadi Mas, dalam memperoleh data PMKS kita melakukan 2 cara yaitu melakukan razia dan melihat dari proposal yang masuk. Jadi kalau razia, Dinas Sosial akan bekerja sama dengan Pamong Praja Kota Batu untuk menangkap kelompok masyarakat PMKS yang ada disekitaran jalan Kota Batu, seperti Pengemis, Anak Jalanan, Pengamen dll. Selanjutnya kalau dari Proposal akan tertera Nama-nama

siapa saja yang akan ikut serta dalam proses pelaksanaan pemberdayaan dengan demikian Dinas Sosial akan mengecek langsung ketempat nama-nama tadi untuk melihat kejelasan apakah dia merupakan salah satu kategori PMKS atau tidak, disini tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan sarana prasarana yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Batu.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Setelah pendataan akan jumlah PMKS sudah ada dan tersedia, maka tahap selanjutnya akan di masukkan kedalam perencanaan program oleh Dinas Sosial agar dana yang dibutuhkan tersedia. Dimana setiap proposal atau setiap perencanaan program pemberdayaan yang sudah direncanakan akan dilaksanakan ditahun berikutnya, hal ini dijelaskan oleh Pak Didik Mei.

“Jadi untuk pelaksanaanya mas, pelaksaan program pemberdayaan PMKS itu tergantung program itu kapan masuk, contohnya kalau semisal proposalnya baru masuk 2017 maka pelaksaan programnya itu baru dapat dilaksanakan di Tahun 2018 mas seperti itu.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Selanjutnya setelah program sudah masuk dalam perencanaan selanjutnya adalah pelaksanaan, dalam pelaksanaan pemberdayaan Dinas Sosial Kota Batu akan menyediakan Tenaga Pengajar dan Sarana Prasarana yang dibutuhkan selama proses pemberdayaan dilaksanakan dan dalam pendampingan pemberdayaan, Dinas Sosial memberikan tanggungjawab kepada Pekerja Sosial Masyarakat sebagai Pendamping dalam proses pelaksanaan pemberdayaan. Hal ini dijelaskan oleh Pak Didik Mei

“dalam pelaksanaanya mas, Dinas Sosial Kota Batu hanya menyediakan Tenaga Ahli atau Pengajar dan Menyediakan Sarana-Prasarana yang dibutuhkan selama proses pemberdayaan. Masalah pendamping pemberdayaan itu

ditugaskan kepada PSM mas”(Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Penjelasan dari pak Didik Mei juga dijelaskan kembali oleh Pak Andik sebagai salah satu PSM.

“Jadi mas dalam pendampingan itu, itu ditugaskan kepada kami PSM atau Pekerja Sosial Masyarakat. Nah selain sebagai pendamping, kami PSM juga bertugas untuk mengawasi proses pemberdayaan itu, dimana pengawasan yang kami lakukan akan kami laporkan ke Dinas Sosial atau Dinas Sosial yang akan datang kelokasi pemberdayaan untuk melihat langsung.” (Wawancara pada tanggal 23 April pukul 13.00 WIB di Kelurahan Sisir)

Setelah proses pemberdayaan atau pelatihan sudah selesai maka dari pihak Dinas Sosial akan selalu memantau kembali kelompok masyarakat yang sudah diberdayakan itu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan alat yang sudah diberikan Dinas Sosial Kota Batu kepada kelompok PMKS itu. Hal ini dijelaskan oleh Pak Didik Mei.

“Jadi mas, kalau program pemberdayaan sudah selesai dilaksanakan seperti halnya pelatihan, Dinas Sosial tidak akan langsung lepas tangan. Dinas Sosial masih akan terus memantau agar alat atau sarana prasarana yang diberikan Dinas Sosial kepada Kelompok masyarakat tadi tidak disalahgunakan.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Hal ini juga didukung oleh Pak Andik selaku Pekerja Sosial Masyarakat dan pendamping pemberdayaan.

“Dimana Dinas Sosial akan selalu melakukan pengawasan kepada kelompok PMKS yang sudah diberdayakan tadi agar alat yang diberikan tidak disalah gunakan, dimana pengawasan ini dilaksanakan minimal 1 tahun.” (Wawancara pada tanggal 23 April pukul 13.00 WIB di Kelurahan Sisir)

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada penerima program pemberdayaan ini dilaksanakan minimal 1 tahun, setelah satu tahun Dinas Sosial Kota Batu tidak akan langsung lepas tangan, akan tetapi masih tetap mengawasi untuk tetap memastikan usaha dari hasil pemberdayaan itu masih tetap berjalan hingga usaha itu akan menjadi lebih besar lagi dan lebih baik lagi hingga mereka sudah dapat memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Bentuk pemberdayaan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu antara lain adalah sebagai berikut :

i. Pelatihan

Pelatihan disini adalah pemberian pengetahuan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, disini penyandang masalah kesejahteraan sosial akan dilatih dan diberi skill yang dapat ditumbuh kembangkan oleh mereka sehingga skill mereka itu dapat dijadikan sebagai alat untuk menjadi pekerjaan mereka. Adapun beberapa pelatihan yang sudah pernah dilakukan oleh dinas sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial sendiri adalah sebagai berikut :

➤ Pelatihan Kaum Minoritas

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2012, Kaum minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti

waria, gay dan lesbian. Dan pengertian diatas juga sesuai dengan penjelasan dari ibu Sri Yunani

“Kaum minoritas itu LGBT, Gay, Bencong itu jadi satu. Nah, kenapa kok mereka itu penyakit.? Mereka itu penyakit sosial yang harus ditangani agar mereka bisa sedikit berubah dan supaya mereka memiliki keterampilan yang baik. Dan untuk 2017 program apa yang dilakukan.? Hampir sama yaitu program pemberdayaan dengan Peningkatan keterampilan dan pelatihan untuk kaum minoritas sebanyak kalau tidak salah 60 orang. Siapa yang membuat pelatihan itu.? Dinas sosial kota batu, bekerja sama dengan siapa? bekerja sama dengan BLK Kota malang. Siapa yang menentukan program itu.? Mereka sendiri. Dinas sosial ini menentukan program bukan kita yang menentukan, mereka yang meminta. Jadi mereka minta apa bu yunani.? Saya minta ini, komunitas ini minta diberikan pelatihan agar dapat mengisi hari-hariku sampai tua nanti. Apa yang diinginkan.? Rata-rata mereka senangnya masak nak. Untuk 2017 masak ikan dari daun singkong, roti dari buah pisang. Berapa lama.? Itu dilaksanakan 1 minggu atau 5 hari kalau tidak salah. Hasilnya seperti apa.? Kita mencoba untuk mengenalkan produk-produk dari hasil mereka dan setelah membuat mereka juga punya penghasilan dari apa yang mereka buat. Untuk minoritas pada tahun 2018 apakah masih dikerjakan.? Iya, orangnya sama.? Sama. Kenapa kok orangnya sama.? Supaya mereka memiliki keahlian, dan tidak cuma memiliki satu keahlian saja tapi dimantapkan ditahun 2018. Pelatihannya apa,? Pelatihan pemberdayaan masakan jepang dan akan kira-kira dilaksanakan di semester 3. Dan orangnya tetap 60 orang serta lengkap dengan alat-alatnya.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelatihan itu diberikan kepada mereka-mereka yang masuk kategori kaum minoritas seperti bencong, dimana tujuannya agar mereka memiliki penghasilan bukan dari hasil mereka sebagai bencong tapi melainkan dari hasil kerja

mereka. Dan tujuan lainnya agar mereka tidak lagi berkeliaran di sekitaran kota batu yang dimana mereka dapat mengganggu keadaan lingkungan sekitar kota batu, apalagi batu merupakan kota wisata.

➤ Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Dimana dalam pemberdayaannya dinas sosial kota batu sudah memberikan pelatihan dalam penggunaan komputer, selain dari pelatihan dinas sosial kota batu juga memberikan sarana-prasarana. Hal ini ditegaskan oleh ibu Sri Yunani

“Pada 2017 penyandang disabilitas, ada 2 program. Pemberian sarana prasana alkes (Alat Kesehatan pada tahun 2017) sebanyak 150 dan Bantuan untuk pemberdayaan melalui pemberian computer (2016). Tujuannya agar mereka bisa berkarya menggunakan computer. Pada tahun 2017 pemberdayaan kepada penyandang disabilitas tidak bisa dilaksanakan karena adanya ott di kota batu. Dan pada tahun 2018 Pemberian sarana prasarana alkes dan pelatihan kerajinan tangan kepada penyandang cacat diluar panti 150an.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ini ditujukan kepada mereka-mereka yang menyandang status cacat fisik, dimana tujuannya supaya mereka memiliki keterampilan, dimana mereka

akan dididik dan dilatih supaya dapat mengoperasikan computer, dengan kata lain mereka yang sudah dapat mengoperasikan computer dapat memiliki pekerjaan dibidang editing yang dimana hal ini dapat membuat penghasilan.

➤ Anak Terlantar dan Anak Jalanan

Pemberdayaan ini merupakan salah satu pelatihan yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Batu dalam memberdayakan anak terlantar, anak yang tidak memiliki penghasilan. Pemberdayaan ini dilakukan dengan cara melatih anak terlantar, punk dan anak jalanan untuk memiliki keahlian seperti memotong rambut. Hal ini dijelaskan dalam wawancara oleh ibu Sri Yunani,

“Pemberdayaan penanganan kesejahteraan sosial anak terlantar, punk dan anak jalanan. Pada tahun 2017 diberikan compressor, sing melaku piro.? Sing mlaku dari sepuluh kompresor kiro-kiro Limo iku wes apik. Setelah dilakukan pelatihan-pelatihan dinas sosial kerjanya apa.? Tugasnya woro-woro ke masyarakat batu bahwa kita mempunyai anak-anak iki yang mempunyai potensi agar ekonominya tetap jalan.

Selanjutnya ada pemberdayaan melalui potong rambut, kita ingin anak-anak itu jadi barbershop artinya dengan biaya yang murah dan dengan pengadaan yang murah mereka sudah bisa bekerja, sudah bisa membuka lapangan pekerjaan dan tidak harus potong rambut ditempat, buat saja online atau potong rambut keliling dan itu ada sekitar 20 orang dan dilatih selama 3 hari dengan latihan motong rambut dasar. Dan anak itu bukan mereka yang tidak mengerti motong rambut tapi mereka yang sudah mengerti dasar motong rambut. Kita pilih anak panti 4 anak dan sisanya anak luar panti.selanjutnya pihak dinas sosial melakukan promosi bahwasanya dinas sosial memiliki anak-anak yang bisa motong rambut. Kalau diluar 10rb kalo di dinas sosial

3rb aja” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Dari pemaparan diatas dapat dilihat, pemberdayaan yang ditujukan kepada anak jalanan dan anak terlantar, supaya mereka memiliki ketrampilan dibidang pangkas rambut. Dimana ketrampilan ini akan menjadi pekerjaan buat anak jalanan dan anak terlantar yang sudah diberdayakan tadi agar memiliki penghasilan. Selain memberikan pelatihan dan menyediakan sarana prasarana, Dinas Sosial Kota Batu juga melakukan pemasaran atau promosi terhadap pekerjaan PMKS yang sudah diberdayakan itu. Dimana hal ini akan menjadi info kepada Masyarakat Kota Batu bahwasannya ada jasa tukang pangkas.

ii. Modal

Bentuk pemberdayaan ini adalah dengan cara melakukan pemberian permodalan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk meningkatkan usahanya, dimana modal ini hanya dikasih beberapa kategori saja, yang dimana dimaksud disini adalah orang-orang yang sudah diberdayakan tapi ingin meningkatkan usahanya. Seperti halnya pemberian modal kepada ex-napi narkoba. Hal ini dijelaskan Ibu Sri Yunani dalam wawancara dimana Ex-Napi pengguna narkoba diberi modal

“Tahun 2016, kita bekerja sama dengan dinas sosial provinsi kita mendapat bantuan modal sebanyak 20 orang dengan masing-masing mendapat Rp. 2.500.000 per/orang. Nah itu untuk apa.? Itu untuk ex-napi yang terpilih dan

sudah diseleksi yang sudah bekerja seperti jual mie, jual bakso.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Pemberian modal ini juga hanya ditujukan kepada mereka-mereka yang sudah memiliki pekerjaan, bukan mereka-mereka yang tidak memiliki pekerjaan, tujuannya ini agar ex-napi yang tidak memiliki pekerjaan ini tadi tidak menyalahgunakan uangnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Pak Didik Mei dalam wawancara

“Itu bantuan diberikan kepada ex napi yang sudah bekerja yang memiliki embrio kerja, bukan untuk ex napi yang masih nganggur terus dikasih duit enggak. Terus pada 2017 ini juga ex-napi tadi mendapat bantuan lagi dari Dinas Sosial, bantuan ini bukan berupa modal uang tapi modal alat yang akan dipakai oleh ex-napi tadi.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Hal serupa juga dijelaskan kembali dalam wawancara oleh Ibu Sri Yunani

“Terus pada tahun 2017 mereka Ex-Napi dapat rombongan untuk berjualan dan alat peralatan. Dimana tujuannya untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih baik lagi.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwasannya pemberian modal dari Dinas Sosial kepada PMKS hanya akan diberikan kepada mereka-mereka PMKS yang sudah diberdayakan dan sudah memiliki pekerjaan atau usaha tetap. Pemberian modal tidak diberikan kepada Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial yang masih baru mau memulai, akan tetapi hanya diberikan kepada mereka yang sudah memiliki embrio kerja.

iii. Penyuluhan atau Sosialisasi

Salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Batu sendiri adalah melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah di Kota Batu, dimana tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, hal ini dijelaskan oleh Ibu Sri Yunani

“Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial selanjutnya adalah melakukan penyuluhan mas, penyuluhan ini dilaksanakan keseluruh sekolah-sekolah di Kota Batu mas, dengan tujuan untuk mencegah PMKS meningkat, karena belakangan ini anak Sekolah sudah mulai banyak berkeliaran dijalanan pada saat jam sekolah.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Pada tahun 2018 ini Dinas Sosial Kota Batu sudah melakukan penyuluhan, seperti yang dijelaskan oleh Bu Sri Yunani:

Pada tahun 2018 dinas sosial kota batu melakukan penyuluhan dan ada 2 penyuluhan yang sudah dilaksanakan :

1. Penyuluhan kepada anak sekolah, karena kota batu adalah kota wisata banyak anak sekolah yang sudah mulai masuk punk, jalan keluyuran gak karukaruan. Dan akan saya beri penyuluhan akan pentingnya masa depan dan menjauhi kenakalan-kenakalan remaja. Jadi apa yang dilakukan.? Penyuluhan ke 5 sekolah,
2. Penyuluhan untuk kader-kader di kota batu, batu ini kota wisata banyak masalah sosial di kota batu. Anak-anak bayi banyak dibuang di kota batu dan sejak tahun 2017

sudah tercatat 8 anak bayi. Dan merupakan kasus nasional. Kita masih memerlukan penyuluhan kepada tokoh masyarakat cara mengadopsi anak yang benar, dan akan ada disisipkan penanganan orang gila, karena dikota batu sendiri sering dibuang. Orang gila yang gak punya keluarga. (Wawancara di Dinas Sosial Kota Batu)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya penyuluhan itu dilaksanakan untuk mencegah meluasnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat memahami pentingnya mencegah diri dari agar terhindar sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, apalagi bagi mereka yang masih sekolah, siswa-siswi dikota batu dihimbau agar lebih peduli terhadap pendidikannya agar bisa memiliki masa depan yang cerah.

c. Aktor-Aktor yang Terlibat

Adapun Aktor-Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota batu adalah sebagai berikut :

i. Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial disini memiliki peran antara lain yaitu melakukan sosialisasi, menyediakan sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan pemberdayaan, hal ini dijelaskan oleh Pak Didik Mei dalam wawancara :

“Dinas Sosial Kota Batu bersedia memberikan fasilitas sarana prasarana dalam pelaksanaan

pemberdayaan dengan syarat setiap sarana prasarana yang diberikan harus digunakan dengan baik dan tidak boleh dijual.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Selain daripada penyedia sarana prasarana dalam pemberdayaan, dinas sosial juga memiliki sebagai tempat untuk meningkatkan keberfungsian penyandang masalah kesejahteraan sosial. Fungsi ini juga dijelaskan oleh Ibu Sri Yunani selaku Kepala Bidang yang menangani pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada wawancara di dinas sosial yang menuturkan :

“Fungsi Dinas Sosial ?Meningkatkan keberfungsian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Siapa saja? Gelandangan, pengemis, lansia, anak terlantar, penyandang cacat, kaum minoritas, intinya semua jenis kategori PMKS itu mas.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Berdasarkan wawancara diatas, fungsi dinas sosial lainnya adalah meningkatkan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dimana peningkatan keberfungsian yang dimaksud disini adalah masyarakat yang sebelumnya masuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial jadi lepas statusnya dari penyandang.

ii. Kepala Desa

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di kota batu, Kepala desa disini memiliki peran sebagai orang yang mengetahui keadaan masyarakatnya apakah masuk kategori PMKS atau tidak, selain daripada orang yang mengetahui data masyarakatnya, Kepala Desa juga disini memiliki peran lain yaitu, sebagai orang yang menyediakan tempat untuk melaksanakan proses pemberdayaan. Hal ini dijelaskan oleh Pak Didik Mei dalam wawancara

“Aktor selanjutnya ada Kepala Desa mas, Kepala Desa disini memiliki peran sebagai penyedia tempat mas, tempat yang dimaksud itu tempat untuk melaksanakan program pelatihan pemberdayaan mas.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Kepala Desa disini maksudnya adalah sebagai orang yang mencari tempat, dimana pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial itu akan dilaksanakan. Selain sebagai orang yang mencari atau menyediakan tempat, kepala desa disini juga sebagai orang yang membantu PSM dalam pendataan masyarakat.

iii. Pekerja Sosial Masyarakat

Selanjutnya ada Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) disini memiliki peran sebagai perantara antara Dinas Sosial dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan suatu program pemberdayaan. Hal dijelaskan oleh Pak Didik Mei dalam wawancara.

“Adapun aktor yang terlibat lainnya disini mas dalam pemberdayaan ini adalah PSM atau Pekerja Sosial Masyarakat, dimana PSM disini berperan sebagai perantara antara Dinas Sosial itu sendiri dengan masyarakat, jadi PSM

disini bertugas sebagai penghubung Dinas Sosial dengan masyarakat dimana maksudnya mas, apapun yang dibutuhkan masyarakat dalam proses pemberdayaan itu bisa diminta ke PSM selanjutnya PSM akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Selain menjadi penghubung Dinas Sosial dengan masyarakat, PSM juga memiliki peran lain yaitu sebagai pendamping pemberdayaan. Hal ini dijelaskan kembali oleh pak Didik Mei dalam wawancara

“Jadi mas, selain sebagai penghubung Dinas Sosial dengan masyarakat, PSM disini juga memiliki peran sebagai pendamping mas dalam pelaksanaan pemberdayaan, jadi nanti pas proses pemberdayaan dilaksanakan PSM disini akan sebagai pendamping sekaligus orang yang akan bertanggung jawab kepada Dinas Sosial bahwasanya setiap sarana-prasarana yang diberikan Dinas Sosial dalam pemberdayaan itu digunakan dengan baik dan benar.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

PSM atau Pekerja Sosial masyarakat, selain daripada jadi Pengawas PSM juga disini sebagai pendamping dan penghubung antara Dinas Sosial dengan kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, maksudnya disini adalah Pendamping disini PSM akan selalu mendampingi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan selalu mengawasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial apakah pemberdayaan itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak, jika Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial itu memiliki kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan, PSM akan menjadi perantara ke Dinas Sosial untuk memberitahukan kendala yang dihadapinya jadi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial disini tidak perlu lagi

repot dan beramai-ramai berangkat bersama ke Dinas Sosial untuk memberitahukan kendalanya.

iv. Teknisi atau Pengajar

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, Dinas Sosial sendiri menyediakan Teknisi atau tenaga pengajar dimana disini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberdayaan, dia berperan sebagai guru atau orang yang akan mengajar dan melatih suatu kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberdayaan.

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Didik Mei dalam wawancara,

“Dinas Sosial akan menyediakan teknisi atau tenaga pengajar dalam pelaksanaan pemberdayaan, dimana tenaga pengajar ini merupakan orang-orang sangat ahli dalam bidangnya, contohnya seperti tenaga pengajar tukang pangkas untuk anak jalanan, jadi teknisi atau tenaga pengajar ini semuanya sudah ahli dalam bidangnya.”
(Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Teknisi disini adalah orang yang memberikan pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, teknisi ini merupakan orang yang sudah benar-benar ahli dalam bidangnya dimana dalam setiap pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu, Dinas Sosial Kota Batu akan selalu mencari teknisi atau tenaga pengajar yang benar-benar berkompeten.

v. Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam pelaksanaan pemberdayaan aktor yang paling utama adalah adanya masyarakat yang diberdayakan yang tidak lain adalah

masyarakat penyanggah masalah kesejahteraan sosial. Hal ini dijelaskan oleh pak Didik Mei

“Jadi mas, aktor yang paling utama dalam pemberdayaan masyarakat PMKS itu sendiri adalah adanya peserta dari PMKS itu sendiri mas, minimal 10 orang, kalau tidak ada orang dari PMKS itu sendiri tidak ada tentu program pemberdayaan itu tidak bisa dilaksanakan mas.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya aktor utama dalam pemberdayaan ini adalah masyarakat penyanggah masalah kesejahteraan sosial itu sendiri, jadi perlu adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mengikuti pemberdayaan ini. Dimana dengan adanya partisipasi dari masyarakat ini pemberdayaan dapat dilaksanakan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan penyanggah masalah kesejahteraan sosial pasti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kita bisa melihat dari faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan program tersebut, baik faktor pendukung ataupun faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dan penghambat sesuai hasil di lapangan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu tentunya ada yang menjadi pendukung,

sehingga program tersebut harus tetap berjalan dan dilaksanakan untuk direalisasikan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang pendukung dari Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat adalah:

i. Faktor Internal

a) Visi-Misi

Adanya visi misi Dinas Sosial kota batu yaitu “menuju masyarakat kota batu yang produktif dan sejahtera” yang mendukung proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tentu setiap program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan didukung oleh Dinas Sosial. Jadi setiap ada proposal yang dimasukkan ke Dinas Sosial terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan akan dimasukkan Dinas Sosial ke Pemerintah Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Didik Mei dalam wawancara :

“adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan ini ada pada visi dan misi dinas sosial yaitu menuju masyarakat kota batu yang produktif dan sejahtera, sehingga kalau ada proposal yang masuk ke Dinas Sosial terkait pemberdayaan akan diproses langsung, jadi adanya Visi Misi ini mas mempermudah masuknya Proposal.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial yang memiliki Visi Misi yaitu menuju masyarakat Kota Batu yang produktif dan sejahtera, untuk mencapai visi misi itu tentu

Dinas Sosial Kota Batu akan melakukan berbagai cara agar Visi Misi itu dapat terwujud dan salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu adalah dengan cara melakukan Pemberdayaan atau menerima proposal pemberdayaan, dimana Pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat terkhusus masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, selain dari produktifitas yang semakin meningkat tentu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial tadi juga akan meningkat juga.

b) Regulasi

Regulasi yang dimaksud disini adalah tujuan Nasional Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Selain daripada regulasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada juga regulasi dari UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung Dinas Sosial dalam melaksanakan pemberdayaan PMKS di Kota Batu seperti yang dijelaskan oleh pak Didik Mei dalam wawancara :

"jadi mas landasan hukum yang digunakan dalam pemberdayaan ini masih mengacu pada UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" oleh karena itu Dinas Sosial wajib untuk mengurus mereka-mereka ini agar memiliki taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik itu dimaksudkan bahwa mereka sudah memiliki penghasilan dan memiliki keterampilan. (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kota Batu masih mengacu kepada UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, dimana Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berawal dari kata dipelihara tentu Dinas Sosial Kota Batu harus memperhatikan bagaimana cara yang mereka lakukan untuk menjaga dan merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar tadi. Dan salah satu yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu adalah melakukan pemberdayaan kepada Fakir miskin dan anak-anak terlantar tadi. Dimana tujuannya pemberdayan ini supaya mereka memiliki ketrampilan, sembari memiliki ketrampilan akan memiliki penghasilan juga dimana ini dapat mengubah status mereka yang semulanya masyarakat fakir miskin jadi masyarakat sederhana yang sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

c) Anggaran Skala Prioritas

Anggaran skala prioritas yang dimaksud disini adalah anggaran dari proposal yang masuk ke Dinas Sosial untuk dipertimbangkan atau dinaikkan ke Pemerintah Daerah Kota Batu, dengan tujuan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberdayaan itu sendiri. Hal ini dijelaskan juga oleh ibu Sri Yunani,

“Pemberdayaan dari proposal yang masuk dengan kata lain sesuai dengan permintaan masyarakat. Bagaimana cara menentukannya.? Dengan cara skala prioritas, yang mana yang paling banyak akan diutamakan. Setelah itu akan di cek ke lokasinya apakah desa ini benar membutuhkan

pemberdayaan dan apakah data-data yang dimasukkan dalam proposal itu benar atau tidak, benar gak orangnya atau tidak. Setelah itu baru akan dilakukan pemberdayaan dengan syarat jani sarana-prasarana atau alat yang diberikan tidak akan dijual.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial memiliki anggaran untuk pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, walaupun dana yang dibuatkan adalah anggaran skala prioritas, dimana pemberdayaan dilaksanakan untuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat dijadikan sebagai ikon pemberdayaan yang dimana hal itu dapat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mana yang paling banyak.

d) Sarana Prasarana

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan dinas sosial kota batu bersedia menyediakan sarana prasarana bagi setiap pemberdayaan yang akan dilakukan. Dimana setiap sarana prasarana yang disediakan oleh dinas sosial kota batu dalam proses pemberdayaan harus dipakai, dijaga dan disimpan baik-baik dan tidak boleh dijual. Seperti yang ditegaskan oleh pak Didik Mei sendiri dalam wawancara.

“dinas sosial kota batu akan menyediakan sarana prasana yang dibutuhkan dalam pemberdayaan PMKS akan tetapi dengan syarat, bahwa setiap sarana-prasarana yang digunakan harus dipakai dan tidak boleh dijual.”

(Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Hal ini juga dijelaskan kembali oleh mas Sugiarto dalam wawancara.

“dinas sosial emang menyediakan sarana-prasarana mas, makaya itu yang jadi daya tarik saya dulu mas, kenapa saya mau mengikuti pemberdayaan ini, lah saya tinggal belajar doang mas, alat-alat udah dikasih, ilmu udah dikasih juga ditambah uang saku juga dikasih juga mas.” (Wawancara pada tanggal 19 juli 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan faktor pendukung bahwasannya Dinas Sosial Kota Batu akan menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan, Dinas Sosial Kota Batu akan memberikan semua perlengkapan yang dibutuhkan akan tetapi setiap perlengkapan atau sarana-prasarana yang diberikan tidak boleh dirusak secara sengaja apalagi dijual.

ii. Faktor Eksternal

a. Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung dari pelaksanaan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial sendiri adalah adanya partisipasi masyarakat, dimana adanya masyarakat yang mau mengubah kondisi ekonominya menjadi lebih baik, adanya masyarakat yang mau mengubah keadaanya, adanya masyarakat yang mau dan bersedia untuk diberdayakan. Hal ini juga dijelaskan oleh Pak Didik Mei dalam wawancara :

“faktor pendukung yang paling utama dalam proses pemberdayaan itu sendiri ialah adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, dengan kata lain masih ada masyarakat yang peduli pada dirinya sendiri dan ingin

mengubah kehidupan ekonominya yang kurang mampu. kalau tidak ada partisipasi masyarakat itu sendiri ya percuma mas program ini dilaksanakan.” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya aktor utama dalam pemberdayaan ini adalah masyarakat penyanggah masalah kesejahteraan sosial itu sendiri, jadi perlu adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mengikuti pemberdayaan ini. Dimana dengan adanya partisipasi dari masyarakat ini pemberdayaan dapat dilaksanakan. Dan di Kota Batu sendiri masih banyak masyarakat yang mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan ini seperti yang dijelaskan oleh mas Sugiarto dalam wawancara.

“sebenarnya beruntung banget mas ikut pemberdayaan ini, soalnya kita udah dilatih apalagikan mas saya cuma tamatan SMP ya gak mungkinlah gampang dapat pekerjaan tamatan SMP mas, ditambah lagi disediakan alat mas, kita Cuma datang ikut pelajaran pelatihannya udah. Dan gitu juga mas kita dipromosiin juga mas tempat pangkas kita ini, ya kurang enak apalagi mas.”(wawancara pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya masih ada masyarakat yang tertarik untuk mengikuti pemberdayaan ini, merasa beruntung mengikutinya dan sadar akan kemampuan dalam dirinya. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat PMKS ini akan menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu adalah antara lain :

i. Faktor Internal

a) Anggaran

Anggaran adalah salah satu alat yang paling dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan program, tanpa adanya anggaran akan mempersulit berjalannya program. Penghambat disini adalah anggaran yang diinginkan tidak selalu ada, dikarenakan tidak sangat terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Dinas Sosial itu sendiri khusus untuk pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga untuk memperoleh anggaran Dinas Sosial biasanya harus memasukkan proposal ke Pemerintah Kota Batu untuk mendapat dana. Dan itu belum tentu diterima. Minimnya anggaran ini juga akan mempengaruhi seluruh kategori PMKS ini tidak memiliki dana untuk setiap Kategorinya. Minimnya anggaran yang ada dalam Dinas Sosial sendiri menjadi salah satu kendala yang dihadapi Dinas Sosial ketika mau melakukan pemberdayaan terhadap PMKS. Hal dijelaskan oleh ibu Sri Yunani

“tidak semua sasaran pmks itu diselesaikan, walaupun sebenarnya kepengen semuanya harus diselesaikan tetapi karena keterbatasan anggaran, sehingga kita pilih yang bisa menjadi ikon dalam artian yang memiliki masalah sosialnya yang banyak”. (Wawancara pada tanggal 16 April pukul

13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Dengan penjelasan diatas dapat diartikan bahwasannya proposal yang diterima hanya proposal yang memiliki memiliki jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang banyak akan dipilih. Dengan kata lain jika ada beberapa proposal yang masuk hanya yang paling banyak yang akan dilaksanakan selanjutnya yang jumlah PMKS nya sedikit akan dilaksnakan jika anggaran dana Dinas Sosial sudah ada lagi, dan ini merupakan suatu kendala dalam mempercepat meminimalisir jumlah PMKS di Kota Batu.

b)Data Dinamis

Data Dinamis sendiri merupakan data yang selalu mengalami perubahan setiap waktu secara *continuo* atau berkelanjutan, dengan perubahan data seperti itu, pemerintah harus cepat melakukan verifikasi agar tidak terjadi double penerima program dan melakukan pergantian calon penerima program. Apabila pemerintah lambat melakukan cek verifikasi maka ini akan menjadi faktor penghambat dari program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Hal ini dijelaskan oleh pak didik mei yang menyatakan :

“Data jumlah pmks pada tahun 2017 belum tersedia, karena pendataan yang masuk ke Dinas Sosial belum masuk dari

seluruh desa, hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang tergolong kategori PMKS untuk memberikan data-data pribadi dari masyarakat PMKS itu sendiri dan tidak lengkap ditambah lagi adanya PMKS yang berasal bukan dari daerah Kota Batu ini menjadi menambah pekerjaan Dinas Sosial Kota Batu, ini menjadi penghambat juga, karena PMKS yang bukan dari Kota Batu akan dipulangkan ketempat asalnya” (Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan data yang dinamis merupakan yang salah satu penghambat dalam pemberdayaan ini dikarenakan adanya perubahan data yang cepat sehingga mempersulit pendataan, perubahan data ini dapat dilihat dari adanya beberapa masyarakat yang tidak memberikan data laporan pribadi ke Dinas Sosial yang tidak lengkap.

ii. Faktor Eksternal

a. Pemikiran Masyarakat itu Sendiri

Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial itu sendiri adalah masyarakat itu sendiri. Penghambat disini maksudnya adalah orang yang melaksanakan pemberdayaan itu tidak memaksimalkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial itu sendiri, dimana masyarakat yang mengikuti pemberdayaan masih ada yang tidak serius mengikuti dan menjalankan pemberdayaan. Dan ditambah lagi tidak adanya kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti pemberdayaan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Pak Didik Mei dalam wawancara :

“faktor penghambat dalam pemberdayaan itu sendiri mas itu tidak lepas dari masyarakat penerima program itu juga mas, karena apa.? Karena masih ada masyarakat mas yang masuk dalam kategori PMKS tapi tidak memiliki kesadaran untuk merubah dirinya mas, masih banyak masyarakat itu malas mas.”(Wawancara pada tanggal 16 April pukul 13.00 WIB di Ruang Dinas Sosial)

Berdasarkan wawancara diatas bahwasannya masih ada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi dikarenakan malas dan penghasilan yang didapat dari pemberdayaan itu lebih sedikit daripada yang didapat dari hasil mengemis. Pemikiran seperti akan menghambat keberhasilan pemberdayaan yang dimana hasilnya akan sia-sia jika masih berpikiran seperti itu.

C. Analisis Data dan Interpretasi

1. Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Batu dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu:

Dinas sosial sebagai suatu perangkat daerah yang memiliki peran dalam mengambil keputusan tentu memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan suatu program dalam menangani suatu kasus seperti halnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dinas sosial tentu dituntut untuk menyelesaikan masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial karena ini merupakan fungsi dinas sosial. Dan dalam praktik ilmu administrasi publik di dinas sosial, sudah sesuai dengan dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokroamidoyo dalam Tjiptoherijanto dan manurung (2010: 112), terdapat tiga fungsi utama dalam administrasi publik, yaitu :

a. Formulasi Kebijakan

Fungsi Formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan. Dalam formulasi kebijakan dibutuhkan konsistensi agar tercapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu/generasi, antar unit pemerintah.

b. Pengaturan/Pengendalian Unsur-unsur Administrasi

Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola ialah organisasi, keuangan, kepegawaian, sarana-sarana lain. Pengendalian unsur-unsur administrasi adalah mengenai pengelolaan internal administrasi publik atau pengelola kapasitas administrasi publik.

c. Penggunaan Dinamika Administrasi

Dinamika administrasi publik meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Peraturan/pengendalian unsur-unsur administrasi menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

Dengan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Dinas Sosial Kota Batu harus memiliki suatu cara yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Batu khususnya mengenai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dan Dinas Sosial harus melakukan suatu perencanaan untuk menanggulangi PMKS. Dan salah satu solusi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu adalah Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan di Kota Batu yang dimana pemberdayaan ini bertujuan guna untuk meningkatkan produktifitas masyarakat kota batu. Dimana pemberdayaan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas individu atau kelompok masyarakat dalam menciptakan kemandirian masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Sulistiyani (2004 :80) yang menyatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Dengan telaksananya pemberdayaan, tentu akan berdampak dengan pencapaian pada visi dan misi dinas sosial kota

batu yaitu menuju masyarakat kota batu yang produktif dan sejahtera. Dengan demikian adanya pemberdayaan ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat Kota Batu khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Selain dari peningkatan produktifitas, masyarakat Kota Batu akan mengalami peningkatan kesejahteraan karena dimana sebelumnya rata-rata penerima pemberdayaan itu tidak memiliki pekerjaan tetap dan menjadi memiliki pekerjaan tetap dan dapat memenuhi kebutuhannya. Dan tujuan dari pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan akan tercapai sesuai dengan Menurut Fahrudin (2012 :10), kesejahteraan sosial mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasannya indikator kesejahteraan itu terdiri dari tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial, selanjutnya memiliki pekerjaan dan penghasilan ini akan menjadi penunjang utama sebagai hasil untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

a) Proses Pemberdayaan

Dalam proses pemberdayaannya Dinas Sosial Kota Batu melakukan proses pemberdayaannya dengan beberapa langkah antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan Pendataan,
- b. Melihat isu atau masalah sosial
- c. Menerima proposal dari Kelompok
- d. Melakukan Musrembang mulai dari Desa, Kecamatan hingga Kota Batu untuk melihat permasalahan sosial yang dimiliki oleh Kota Batu.
- e. Setelah itu, akan dibuat perencanaan dengan cara membuat suatu program pemberdayaan.
- f. Setelah perencanaan program selesai akan di masukkan ke RPJMD untuk memperoleh anggaran.
- g. Setelah anggaran turun, pemberdayaan siap dilaksanakan.
- h. Selama pelaksanaan Dinas Sosial akan menyediakan Alat atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan.
- i. Setelah pemberdayaan dilaksanakan, penerima program pemberdayaan akan diawasi minimal 1 tahun.
- j. Selain dari mengawasi Dinas Sosial akan membantu untuk mempromosikan usaha dari PMKS itu sendiri di lingkungan Kota Batu.

Berdasarkan penjelasan proses pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwasanya proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri sudah sangat baik karena sudah hampir sesuai dengan Teori yang dikemukakan Soekanto, 1987:63 yaitu antara lain sebagai berikut :

1. **Tahap Persiapan.** Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. **Tahapan pengkajian (assessment).** Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. **Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.** Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. **Tahap pemformalisasi rencanaaksi.** Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
5. **Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.** Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
6. **Tahap evaluasi.** Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk

pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. **Tahap terminasi.** Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti

Dalam proses pemberdayaan ini Dinas Sosial mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya sudah sesuai dengan teori diatas dimana mulai dari persiapan yaitu melakukan pendataan, selanjutnya melakukan pengkajian mulai dari melihat isu sosial dan bahkan merima proposal pemberdayaan masuk, selanjutnya dalam tahap perencanaan dinas sosial kota batu juga melakukan perencanaan dengan melibatkan masyarakat selanjutnya pelaksanaan, selanjutnya terminasi atau pemutusan hubungan setelah pemberdayan dilaksanakan disini dinas sosial tidak melakukan terminasi karena dinas sosial harus menjamin bahwa masyarakat yang diberdayakan itu harus produktif dan harus sejahtera sesuai visi misi dinas sosial sehingga tidak ada terminasi, akan tetapi akan ada pengwasan rutin yang dilaksanakan minimal 1 tahun.

b) Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Bentuk-bentuk Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dimiliki Dinas Sosial terdiri dari 3 jenis yaitu :

- a. Pelatihan Kerja
- b. Permodalan
- c. Penyuluhan

Dimana ketiga bentuk pemberdayaan ini dapat dilihat dari penjelasan dan penyajian data dari penulis. Dapat disimpulkan bahwa sebagai bagian dari pemberdayaan, bentuk pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sudah cukup bagus, hal ini dikarenakan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan, memberdayakan seluruh jenis kategori PMKS, baik itu anak jalanan, anak punk, ex-napi, disabilitas dan lain-lain. Melihat hal tersebut dapat diartikan bahwasannya Dinas Sosial Kota Batu memperhatikan seluruh jenis PMKS. Tidak hanya memberikan pelatihan kerja saja, akan tetapi Dinas Sosial juga memberikan kesempatan permodalan juga untuk kelompok masyarakat yang sudah diberdayakan tadi, dimana dengan syarat modal yang diberikan tidak disalahgunakan dengan demikian hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat kesuksesan atau keberhasilan untuk mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial tadi memiliki kesempatan yang besar. Selain dari pemberian modal, penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu sendiri juga merupakan satu langkah yang sangat baik, dimana seperti yang dijelaskan dalam penyajian data bahwasannya Dinas Sosial Kota Batu melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk mencegah pertambahan atau peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu, melihat hal ini ternyata Dinas Sosial Kota Batu memperhatikan langkah yang harus diambil untuk mencegah perluasan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dan ini merupakan langkah-langkah yang

sangat baik dari Dinas Sosial karena selain meminimalisir jumlah PMKS melalui pemberdayaan, Dinas Sosial juga mencegah melalui Penyuluhan.

c) Aktor-Aktor yang Terlibat

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial
2. Kepala Desa
3. Pekerja Sosial Masyarakat
4. Tenaga Ahli atau Pengajar
5. Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Melihat aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Batu, itu merupakan aktor utama yang terlibat langsung dalam Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Aktor-aktor yang terlibat tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing, mulai dari Dinas Sosial yang berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan program pemberdayaan, selain sebagai penanggung jawab pelaksanaan program, Dinas Sosial Kota Batu juga memiliki peran sebagai penyedia sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan pemberdayaan. Selanjutnya Kepala Desa memiliki peran sebagai penyedia tempat atau lokasi untuk pelaksanaan pemberdayaan. Selanjutnya Pekerja Sosial Masyarakat, memiliki peran sebagai pendamping dan pengawas proses pemberdayaan penyandang masalah

kesejahteraan sosial, selain dari itu memiliki peran juga sebagai penghubung antara kelompok masyarakat PMKS dengan Dinas Sosial Kota Batu. Selanjutnya tenaga pengajar, memiliki peran sebagai orang yang akan memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat itu. Selanjutnya, masyarakat PMKS, sebagai orang yang akan diberdayakan untuk memiliki keahlian.

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ke-5 aktor itu merupakan aktor utama yang memiliki keterikatan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan dari proses pemberdayaan tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

1. Internal

Adapun faktor pendukung dalam pemberdayaan ini adalah :

- a. Visi-misi
- b. Regulasi
- c. Anggaran Skala Prioritas
- d. Sarana-prasarana

Melihat penjelesan faktor pendukung dalam penyajian data, dapat disimpulkan bahwasannya Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu di cukup baik karena mendapat perhatian khusus dari Dinas Sosial sendiri hal itu ditandai dengan mendukungnya Visi Misi Dinas Sosial Kota terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Batu, dengan demikian tentu hal ini akan berpengaruh

terhadap PMKS sehingga PMKS sendiri di Kota Batu jadi mendapat perhatian dari Dinas Sosial.

Selain visi dan misi Dinas Sosial Kota Batu, regulasi menjadi salah satu faktor pendukung adanya pemberdayaan PMKS di Kota Batu, Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Dikarenakan regulasi ini merupakan salah satu tugas nasional bangsa Indonesia, tentu Dinas Sosial Kota Batu sebagai perangkat daerah dari pemerintahan Kota Batu harus melaksanakan regulasi itu dengan cara membuat suatu program untuk mentaati regulasi itu.

Selain dari itu Penyediaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu juga tergolong baik karena Dinas Sosial mau menerima proposal yang masuk dari kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Dan ini merupakan salah satu langkah yang sangat bagus dari Dinas Sosial Kota Batu sehingga dapat memicu masyarakat Kota Batu khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang apabila memiliki inisiatif dalam pelaksanaan pemberdayaan dapat melakukan pengajuan proposal.

Selain itu, Dinas Sosial Kota Batu yang mempunyai peran sebagai penyedia alat atau sarana prasarana dalam pelaksanaan proses pemberdayaan ini juga merupakan langkah yang sangat baik dikarenakan

masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akan diberdayakan tidak perlu lagi merasa khawatir karena Dinas Sosial Kota Batu sudah akan memberikan fasilitas yang akan dibutuhkan, jadi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya cukup memberikan hati dan pikirannya untuk mau di berdayakan.

2. Eksternal

a. Partisipasi Masyarakat PMKS

Partisipasi dari masyarakat PMKS merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan PMKS. Adanya partisipasi ini dapat disimpulkan sebagai faktor pendukung yang paling penting. Karena mereka yang akan diberdayakan, jika partisipasi masyarakat PMKS kurang akan berdampak pada program itu bahwasannya program itu tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu perlu suatu langkah yang harus diambil oleh Dinas Sosial Kota Batu agar dalam partisipasi masyarakat itu semakin tinggi perlu dilakukan sosialisasi yang secara rutin agar masyarakat PMKS itu tertarik untuk mengikuti Pemberdayaan. Ditambah lagi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kota Batu dan untuk mencapai Visi-Misi Kota Batu menuju masyarakat produktif dan sejahtera tentu partisipasi masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan.

b. Faktor Penghambat

1. Internal

Faktor-faktor penghambat pemberdayaan PMKS di Kota Batu adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Anggaran
- b. Data yang Dinamis

Kedua tersebut merupakan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan PMKS di Kota Batu. Jadi dapat disimpulkan karena anggaran disini menjadi permasalahan dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Batu untuk PMKS itu sendiri sehingga menyebabkan tidak semua permasalahan jenis PMKS Kota Batu dapat diselesaikan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwasannya seharusnya Dana atau anggaran haruslah tersedia untuk semua kategori PMKS, apalagi di Kota Baru sendiri ada sekitar 19 jenis kategori PMKS. Apabila dana sudah ada dapat dilakukan pembagian anggaran untuk setiap kategori PMKS sehingga untuk pemecahan masalahnya dapat dilakukan dengan cepat.

Selanjutnya Data yang dinamis ini menjadi salah satu faktor penghambat dikarenakan pendataan yang lambat dari Dinas Sosial yang disebabkan karena adanya PMKS di Kota Batu yang masih

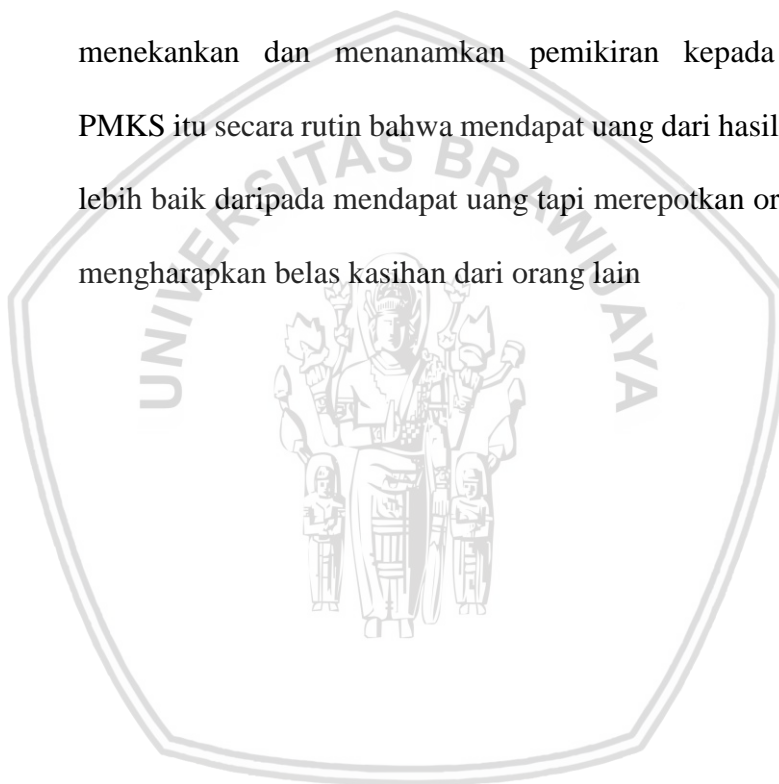
ragu untuk memberikan data pribadinya, ditambah lagi adanya beberapa masyarakat yang tidak memiliki identitas hal ini menjadi penghambat dan harus segera diselesaikan agar tidak terjadi pendataan ganda. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pendataan yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri itu harus turun tangan secara langsung atau melakukan kerjasama dengan beberapa oknum seperti kepala desa atau lurah setiap desa untuk mempermudah dan mempercepat proses pendataan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial. Dan perlu lagi Dinas Sosial secara rutin untuk melakukan Razia PMKS di Kota Batu agar semakin banyak yang didapat, data PMKS di Kota Batu juga akan semakin gampang diperoleh.

2. Eksternal

a. Pemikiran Masyarakat itu Sendiri

Pemikiran masyarakat PMKS itu sendiri maksudnya disini adalah adanya pemikiran masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan. Hal ini dikarenakan pemikiran masyarakat PMKS yang tidak sabaran, sehingga membuat PMKS yang sudah diberdayakan tadi kembali lagi keasal semula, seperti contohnya pengemis. Pengemis yang berpikiran bahwasannya mengemis lebih banyak mendapatkan uang daripada mengikuti

pemberdayaan akan menjadi salah satu faktor penghambat tujuan pemberdayaan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Dinas Sosial harus selalu mengawasi perkembangan terhadap penerima program pemberdayaan agar tidak terjadi lagi kesalahan seperti kembalinya masyarakat PMKS yang sudah diberdayakan itu ketempat dia semula. Dinas Sosial perlu menekankan dan menanamkan pemikiran kepada masyarakat PMKS itu secara rutin bahwa mendapat uang dari hasil kerja sendiri lebih baik daripada mendapat uang tapi merepotkan orang lain atau mengharapkan belas kasihan dari orang lain



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batu menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota batu

a) Proses Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu

Dalam proses atau dalam tahapan pelaksanaan pemberdayaan PMKS oleh Dinas Sosial Kota Batu melakukan beberapa tahapan yaitu antara lain mulai dari, (1) Pendataan, (2) Melihat Isu/Masalah, (3) Menerima Proposal, (4) Melakukan Perencanaan, (5) Pelaksanaan Pemberdayaan, (6) Pengawasan. Dengan kata lain proses atau tahapan dari pemberdayaan dari Dinas Sosial sendiri sudah cukup bagus.

b) Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial di Kota Batu memiliki bentuk-bentuk Pemberdayaan antara lain yaitu: (1) Pelatihan kerja, yaitu pelatihan guna dalam

meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk memiliki keterampilan. Dimana keterampilan itu akan menjadi pekerjaannya dan dengan keterampilannya itu PMKS itu sendiri akan memiliki penghasilan. (2) Permodalan, dalam Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu, Dinas Sosial memberikan kesempatan permodalan kepada PMKS Kota Batu, dimana permodalan itu diberikan kepada PMKS yang sudah diberdayakan dimana tujuan dari permodalan ini untuk meningkatkan usaha yang sudah dimiliki PMKS itu sendiri. (3) Penyuluhan, dalam Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu, Dinas Sosial Kota Batu melakukan Penyuluhan. Dimana Penyuluhan ini ditujukan untuk anak muda yang masih sekolah, dimana ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat betapa pentingnya masa Depan, penyuluhan ini juga ditujukan untuk mencegah penyebarluasan PMKS di Kota Batu.

Dengan kata lain bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial sangat mementingkan segala aspek untuk meminimalisir PMKS di Kota Batu, selain meminimalisir Dinas Sosial Kota Batu juga memberi kesempatan untuk PMKS untuk meningkatkan Usahanya. Selain itu Dinas memiliki tujuan untuk meminimalisir PMKS di Kota Batu, meningkatkan taraf hidup

PMKS, Dinas Sosial Kota Batu juga melakukan pencegahan dan ini merupakan langkah-langkah yang sangat bagus dari Dinas Sosial Kota Batu untuk penanganan PMKS.

c) Aktor-aktor yang terlibat

Dalam Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu ada beberapa aktor yang terlibat yaitu, (1)Dinas Sosial, (2)Kepala Desa, (3) Pekerja Sosial Masyarakat, (4) Teknisi Pengajar, (5) Masyarakat PMKS.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu

a) Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota batu yaitu, (1) Visi-Misi, (2) Regulasi, (3) Dana Skala Prioritas. (4) Partisipasi Masyarakat.

b) Faktor Penghambat

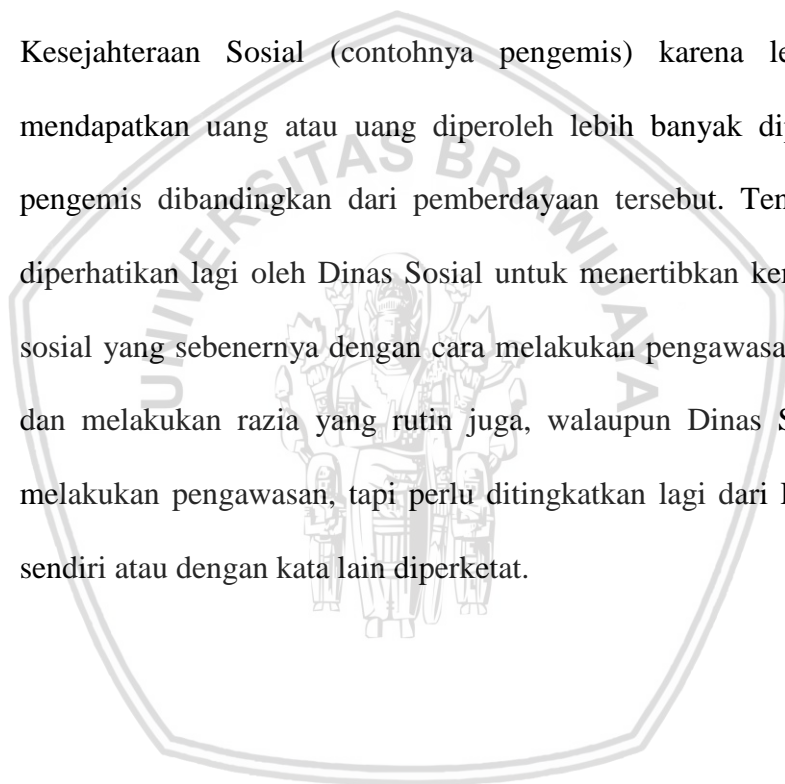
Adapun faktor penghambat dalam Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu yaitu, (1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan (2) Data yang dinamis.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan pihak-pihak yang terkait untuk memaksimalkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, yaitu :

1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan di Kota Batu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi dan meminimalisir jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu, dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti ternyata Dinas Sosial perlu memberikan perhatian khusus untuk seluruh kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batu, dimana perhatian khusus itu dapat berupa memberikan pertimbangan ke Pemerintah Daerah untuk memberikan dana Khusus untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial itu sendiri karena di Kota Batu sendiri memiliki jumlah Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari 19 Kategori. Dimana Dinas Sosial perlu melakukan pembagian dana khusus untuk tiap kategori, jadi tidak perlu lagi melakukan Pendanaan dengan skala prioritas. Karena adanya dana skala prioritas ini menandakan bahwa Dinas Sosial seperti tidak memperhatikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang lainnya.
2. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sudah tergolong baik. Namun,

masih adanya masyarakat Kota Batu yang tidak memiliki kesadaran atau dengan kata lain masyarakat Kota Batu masih ada yang memiliki pemikiran yang malas seperti yang dijelaskan peneliti dalam penyajian data, hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan Pemberdayaan, dimana seperti yang dijelaskan masih adanya masyarakat yang sudah diberdayakan memilih kembali menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (contohnya pengemis) karena lebih mudah mendapatkan uang atau uang diperoleh lebih banyak diperoleh dari pengemis dibandingkan dari pemberdayaan tersebut. Tentu ini perlu diperhatikan lagi oleh Dinas Sosial untuk menertibkan kembali fungsi sosial yang sebenarnya dengan cara melakukan pengawasan yang rutin dan melakukan razia yang rutin juga, walaupun Dinas Sosial sudah melakukan pengawasan, tapi perlu ditingkatkan lagi dari Dinas Sosial sendiri atau dengan kata lain diperketat.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Data Penduduk Miskin 2012-2016*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Handayaniingrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Kartiwa A. dan Nugraha. 2012. *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*. Jakarta: LEPSINDO
- Mardikarto, Totok dan Soebianto Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Meleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial, Perspektif pembangunan dalam kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Islam
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook. Third Edition*. Sage Publication, Inc.
- Muluk, Khairul. 2009. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS PRESS
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Riduwan. 2003. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

_____. 2011. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Cetakan ke III. Bandung : Penerbit Alfabeta

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2010. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional Kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri dan Indonesia Print.

Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

Sutrisno, D. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi*. Semarang: Undip

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syarifin, Pipin. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Bani Quraisy.

Tjiptoherijanto dan manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

SITUS ONLINE

Bps.go.id

Batukota.bps.go.id

Dinsos.batukota.go.id

<http://www.batukota.go.id/>

Jawapos.com

